

SKRIPSI

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Oleh :

**DIKI CANDRA
NPM. 160412011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
TAHUN 2020**

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA (SDM) DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**DIKI CANDRA
NPM. 160412011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(SAP) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh :

**DIKI CANDRA
NPM. 160412011**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
di hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 29 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Diskhamarzaweny, SE., MM
NIDN. 1012038701

Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak
NIDN. 1006068503

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diki Candra
NPM : 160412011
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ilmu Sosial

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, 29 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,

Diki Candra
NPM. 160412011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi”.

Penyusunan proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis., MM. Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi dan Penasehat Akademis peneliti yang telah memberi arahan dan semangat selama perkuliahan.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.S,i selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Diskhamarzaweny, SE., MM Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini;
5. Ibu Dessy Kumala Dewi ,SE, M.Ak pembimbing II peneliti yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Akuntansi dan Staf Fakultas Ilmu Sosial yang telah banyak membantu dan telah banyak memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Islam Kuantan Singingi;
8. Orang tua tercinta yang selama ini telah memberikan nasihat, doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak akan tergantikan oleh apapun.
9. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan saran dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan

membantu penulis selama ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan bagi penulis bahwa proposal skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamualaikum wr.wb.

Teluk Kuantan, 29 Juni 2020

Penulis,

**DIKI CANDRA
160412011**

ABSTRAK

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diki Candra
Diskhamarzaweny
Dessy Kumala Dewi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. (2) Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. (3) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. (4) Pengaruh komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bekerja di bagian keuangan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan staff keuangan. Total populasi dalam penelitian ini adalah 161 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini adalah 104 responden.

Hasil penelitian menunjukkan (1) komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,566; (2) Kualitas SDM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,239; (3) Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,290; (4) Komitmen Organisasi, Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,561.

Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual

ABSTRACT

EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT, QUALITY OF HUMAN RESOURCES AND UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE IMPLEMENTATION OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF KUANTAN SINGINGI

Diki Candra
Diskhamarzeweny
Dessy Kumala Dewi

This study aims to determine (1) The effect of organizational commitment on the implementation of accrual-based government accounting standards in the regional government of Kuantan Singingi. (2) The effect of the quality of human resources on the implementation of accrual-based government accounting standards in the regional government of Kuantan Singingi. (3) The effect of the Utilization of Information Technology on the implementation of accrual-based government accounting standards in the regional government of Kuantan Singingi. (4) The effect of organizational commitment, quality of human resources and Utilization of Information Technology on the implementation of accrual-based government accounting standards in the regional government of Kuantan Singingi.

This research is a type of quantitative research. Sources of data in the study are primary data obtained from the results of questionnaires. The population in this study are employees of the regional apparatus organization Kuantan Singingi who work in the financial department which consists of the Head of Finance, Treasurer of Expenditures, Treasurer of Receipts and financial staff. The total population in this study was 161 respondents. The sampling method used is Purposive Sampling. The number of samples in this study were 104 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression with a statistical program (SPSS 25), after the classical assumption test was fulfilled.

The results showed (1) organizational commitment partially had a positive and significant effect on the implementation of accrual-based government accounting standards in the regional government of Kuantan Singingi Regency by 0,566; (2) The quality of human resources partially had a positive and significant effect on the implementation of accrual-based government accounting standards in the regional government of Kuantan Singingi by 0,239; (3) The utilization of information technology partially had a positive and significant effect on the implementation of accrual-based government accounting standards in the regional government of Kuantan Singingi Regency by 0,290; (4) Organizational Commitment, Quality of Human Resources and Utilization of Information Technology simultaneously had a positive and significant effect on the implementation of accrual-based government accounting standards in the regional government of Kuantan Singingi Regency by 0,561.

Keywords : *Organizational Commitment, Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards.*

LEMBAR PERSETUJUAN

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	20
1.4.1 Manfaat Teoritis	20
1.4.2 Manfaat Praktis	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	22
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik.....	22
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	26
2.1.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
2.1.4 Pengakuan Unsur Laporan keuangan Pemerintah daerah	30
2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua.....	32
2.1.6 Komitmen Organisasi	41
2.1.7 Kualitas Sumber Daya Manusia	46
2.1.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi	51
2.2 Penelitian Terdahulu	56
2.3 Kerangka Pemikiran	63
2.4 Hipotesis Penelitian	64
2.5 Pengembangan Hipotesis.....	65
2.5.1 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua.....	65
2.5.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua.....	66
2.5.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua.....	68
2.5.4 Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia,(SDM), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua.....	70

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Rancangan Penelitian	73
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	73
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	75
3.3.1	Populasi Penelitian	75
3.3.2	Sampel Penelitian.....	76
3.4	Jenis dan Sumber Data	79
3.4.1	Jenis Data	79
3.4.2	Sumber Data.....	80
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	81
3.6	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	82
3.6.1	Variabel Penelitian.....	82
3.6.1.1	Variabel Dependensi.....	82
3.6.1.2	Variabel Independen	83
3.6.2	Defenisi Operasional	86
3.7	Instrumen Penelitian	88
3.8	Analisis Data	90
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	90
3.8.2	Uji Kualitas Data	90
3.8.2.1	Uji Validitas	90
3.8.2.2	Uji Reliabilitas	91
3.8.3	Uji Asumsi Klasik	92
3.8.3.1	Uji Normalitas	92
3.8.3.2	Uji Multikolinieritas.....	93
3.8.3.3	Uji Heteroskedastisitas	94
3.8.3.4	Uji Autokorelasi.....	94
3.8.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	95
3.8.5	Uji Hipotesis	96
3.8.5.1	Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)	96
3.8.5.2	Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F).....	97
3.8.5.3	Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	98
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	100
4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi	100
4.1.2	Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi.....	102
4.1.3	Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi	103
4.1.3.1	Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	103
4.1.3.2	Misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	104
4.1.4	Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	105
4.1.5	Deskripsi Responden	108
4.1.6	Karakteristik Responden	110
4.2	Hasil Penelitian	115
4.2.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	115

4.2.1.1 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI (Y)	116
4.2.1.2 Komitmen Organisasi (X ₁)	119
4.2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X ₂) ..	122
4.2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	127
4.2.2 Hasil Pengujian Kualitas Data	131
4.2.2.1 Hasil Uji Validitas	131
4.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas	135
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	136
4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas	136
4.2.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas.....	137
4.2.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	139
4.2.3.4 Hasil Uji Autokorelasi	141
4.2.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	142
4.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis.....	144
3.8.5.1 Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)	144
3.8.5.2 Hasil Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)	147
3.8.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	148
4.3 Pembahasan	150
4.3.1 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	150
4.3.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kabupaten	
4.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	156
4.3.4 Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	159
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	162
5.2 Saran	163
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta.....	23
2.2 Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut SAP Kas Menuju AkruaI dan SAP AkruaI	37
2.3 Penelitian Terdahulu.....	57
3.1 Jadwal Penelitian.....	74
3.2 Daftar Jumlah Populasi pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi....	75
3.3 Daftar Jumlah Sampel pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi	78
3.4 Defenisi Operasional	86
3.5 Interpretasi Nilai R^2	99
4.1 Daftar Bupati Kuantan Singingi	101
4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner	110
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	111
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	112
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	113
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	114
4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	115
4.8 Tanggapan Responden terhadap Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI (Y)	116
4.9 Tanggapan Responden terhadap Variabel Komitmen Organisasi (X_1)	120
4.10 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2).....	123
4.11 Tanggapan Responden terhadap Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)	127
4.12 Hasil Pengujian Validitas Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI (Y).....	132
4.13 Hasil Pengujian Validitas Variabel Komitmen Organisasi (X_1)	133
4.14 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2)	134
4.15 Hasil Pengujian Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)	134
4.16 Hasil Uji Reliabilitas	136
4.17 Hasil Uji Multikolinieritas	138
4.18 Hasil Uji Autokorelasi.....	141
4.19 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	143
4.20 Rangkuman Uji Statistik t	145
4.21 Rangkuman Uji Statistik F	148
4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	64
4.1 Grafik <i>Normal Probability Standardized Residual</i>	137
4.2 Grafik Scatterplot.....	140
4.3 Hasil Uji Autokorelasi	141

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Kuesioner Penelitian	168
2	Tabulasi Data	174
3	Hasil Pengolahan Data	190
4	Tabel r	209

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999, hal ini diharapkan untuk mempermudah berbagai urusan penyelenggaraan negara. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dapat memiliki hak guna mengatur daerahnya sendiri. Daerah dapat mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap di bawah naungan pemerintah pusat dan dikontrol oleh undang-undang.

Dalam perjalanan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu melalui Undang-Undang No 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah. Kemudian di tahun 2004, Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tadi sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan otonomi daerah. Kemudian diganti oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Undang-undang No 32 tahun 2004 sampai saat ini sudah banyak mengalami perubahan, menyesuaikan dengan perkembangan otonomi daerah. Perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 2008 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Sebagai daerah otonom, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat. Manajemen keuangan di daerah harus dikelola secara ekonomi, efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel. Perpaduan pengawasan terhadap pertanggungjawab pemerintah daerah yaitu antara masyarakat daerah dan pemerintah pusatlah yang melahirkan sistem pengawasan yang baik, benar

dan bermutu (Halim, 2007:9)

Menurut Tanjung (2015:2), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Setiap OPD akan menyampaikan laporan keuangannya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Suhanda, 2007:71). Setiap akhir tahun, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) akan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara mengkonsolidasikan/menggabungkan laporan keuangan masing-masing OPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan selanjutnya disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Suhanda, 2007:72). Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK disampaikan ke DPRD untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan komitmen yang tinggi dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kompetensi dan pengetahuan serta menyediakan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pada mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sedangkan SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tanggal 13 Juni 2005. Dengan terbitnya SAP ini semakin mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan yang juga menandai dimulainya babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 mengamanatkan instansi

pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Dengan adanya Undang-undang tersebut terjadi perubahan pada basis akuntansi sektor publik dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual.

Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 36 ayat (1) yang dinyatakan bahwa mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat – lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah diterbitkan UU tersebut, namun karena pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang pasti dan khusus mengenai SAP berbasis akrual, dan diperkuat pula oleh penjelasan pada pasal yang sama dalam UU No. 17 tahun 2003, menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2010) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana tercantum dalam lampiran II dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP

Berbasis AkruaI yaitu pada tahun 2015.

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat krusial dalam bidang pelaporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena merupakan tahun awal dimulainya penerapan SAP Berbasis AkruaI. Dengan adanya wewenang yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Adanya Peraturan Pemerintah mengenai penerapan akuntansi berbasis akruaI ini, selanjutnya Komite Standar Akuntansi Publik (KSAP) bertanggung jawab di dalam mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 57. Perubahan ini pasti akan memberikan tantangan bagi pemerintah di Riau termasuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Riau untuk mengaplikasikannya.

Suksesnya penerapan PP No. 71 Tahun 2010 di sektor publik tentu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah komitmen pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah. Apabila dalam sebuah instansi pemerintahan memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta didukung oleh teknologi informasi itu mampu menjadi modal awal dalam menunjang penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

Mengubah kebiasaan pencatatan transaksi berbasis kas sangatlah tidak mudah menjadi pencatatan transaksi berbasis akruaI pada tahun 2015, ditambah lagi perubahan sistem pelaporan keuangan dari sistem manual beralih

ke sistem aplikasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang memerlukan kehati-hatian dalam menginput data laporan keuangan serta sumber daya manusia berkualitas, sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal tersebut tentunya memerlukan komitmen yang kuat dari organisasi untuk melakukan perubahan pada kinerja pegawai agar dapat menerapkan akuntansi basis akrual dengan efektif dan efisien.

Menurut Yusuf dan Syarif (2018:26), komitmen organisasi didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Untuk menerapkan akrual basis, diperlukan komitmen dari pimpinan yang selanjutnya komitmen tersebut harus ditransferkan ke seluruh pelaksana. Bukti adanya komitmen pimpinan dan pemahaman para pelaksana tersebut diekspresikan dengan membangun infrastruktur yang dapat menunjang implementasi basis akrual. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan akuntansi basis akrual di Kabupaten Kuantan Singingi.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia agar lebih kompeten serta menyediakan dan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien. Jika tidak ada komitmen dari pemerintah daerah untuk melatih sumber daya manusia dan menyediakan teknologi informasi dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual maka Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual tidak akan terimplementasi dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak berkualitas.

Sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan organisasi pemerintahan salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Nawawi (2010:40),

Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). Menurut Sinambela (2019:3), Sumber daya manusia dalam setiap organisasi baik publik maupun bisnis, adalah sumber daya yang utama, di samping berbagai sumber daya lainnya. Hal itu diakibatkan manusia menjadi pelaku utama yang akan menggerakkan berbagai sumber daya yang dimaksud. Oleh sebab itu, dalam mengelola sumber daya tersebut, SDM-nya haruslah berkualitas. Dengan kata lain, berbagai sumber daya yang melimpah ruah jika tidak diikuti dengan kompetensi SDM akan menjadi percuma karena tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan sumber daya yang berkualitas demi terciptanya akuntansi basis akruaI yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Sumber daya manusia dalam hal ini merupakan pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi pemerintah pusat, daerah, Kementerian dan sektor publik lainnya. Perubahan basis akuntansi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 membuat para staff di pemerintahan harus meningkatkan kemampuan dalam pengetahuan metode baru yang diterapkan pemerintah.

Kualitas sumber daya manusia sangat penting dan dibutuhkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, kualitas dan kompetensi dibidang akuntansi seperti keterampilan, pengetahuan dan kemampuan serta pengalaman maupun latar belakang pendidikan di bidang akuntansi agar dapat mengimplementasikan SAP Berbasis AkruaI dengan baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Jika sumber daya manusia yang terlibat dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual tidak memiliki kualitas yang baik seperti tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi, maka Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual tidak akan terimplementasi dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak berkualitas.

Memasuki era modernisasi, pemerintah dan swasta mulai menggunakan komputer dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini tidak berlebihan karena dengan penggunaan komputer, efektifitas dan efisiensi kerja mengalami peningkatan. Pemerintah dalam melakukan pelaporan keuangan juga sudah menggunakan berbagai aplikasi program yang ditawarkan untuk mempermudah membuat laporan keuangan dan dengan adanya ini, maka diyakini akan mempermudah pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan SAP Berbasis Akrual. Ketersediaan hardware dan software akan membuat penerapan SAP Berbasis Akrual berjalan dengan sempurna karena didukung oleh perangkat pendukung yang layak dan memadai.

Menurut Wilkinson (2010:196), Teknologi Informasi adalah kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Secara umum suatu teknologi informasi dapat memberikan banyak manfaat dalam membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya antara lain transaksi yang diproses dengan cepat, penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, data yang dapat disimpan dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2010:85)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua pada laporan keuangan pemerintah daerah telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang telah diterapkan sejak bulan Oktober tahun 2017 di Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan

pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Pengelolaan sistem informasi ini didukung dengan jaringan koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi memanfaatkan teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Teknologi Informasi digunakan agar memudahkan dan mempercepat pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga meningkatkan efektifitas maupun efisiensi dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah dari sebelumnya yang masih diterapkan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi sangat berperan penting pada pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Jika dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual tidak menggunakan teknologi informasi maka pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Dalam pengimplementasian standar akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya efektif. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan komitmen organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi. Peneliti telah melakukan wawancara sebagai survey awal dalam prapenelitian untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Wawancara tersebut dilakukan dengan Kepala Bidang Akuntansi di Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

yaitu Ibu Dwi Yanti Muharni Yulis berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD mengenai pelaksanaan komitmen organisasi terutama pada saat pengimplementasian SAP berbasis akrual dalam laporan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Mereka mengakui bahwa sudah berkomitmen bersama dengan pimpinan bahwa akan menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) pada pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah mulai dari tahun 2017 tepatnya bulan Oktober 2017 sampai seterusnya. Hal ini merupakan perintah dari pemerintah pusat. Jadi Pemerintah Pusat sudah menerima LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang dikirim melalui aplikasi tersebut. LKPD dalam bentuk manual tidak diterima lagi. Apabila tidak dikirimkan melalui aplikasi SIPKD maka hukumannya yaitu penundaan dana DAU (Dana Alokasi Umum) yang juga mengakibatkan semua gaji pegawai tidak dibayarkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, seluruh LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dari semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dikerjakan oleh staff akuntansi BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi. OPD hanya memberikan data keuangannya saja. Hal ini dikarenakan aplikasi yang baru saja diterapkan dan pada saat itu Bendahara masing-masing OPD dalam tahap pelatihan.

Pada tahun 2018, Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya dikerjakan oleh PPK SKPD / Kasubbag (Kepala Sub Bagian) Keuangan masing-masing OPD. Namun dikarenakan keterbatasan dana untuk pelatihan maka untuk laporan keuangan OPD tahun 2018 dikerjakan oleh

Bendahara masing-masing OPD. Sementara Kassubag Keuangan masing-masing OPD baru diberikan pelatihan pada tahun 2019 ini.

Namun untuk tahun 2019, Bendahara tidak lagi mengerjakan laporan keuangan masing-masing OPD. Hal ini dikarenakan adanya pembagian tugas sehingga untuk laporan keuangan OPD tahun 2019 akan dikerjakan oleh PPK SKPD/Kasubbag Keuangan masing-masing OPD. Tetapi kenyataannya belum sesuai dengan yang diharapkan, beberapa Kasubbag Keuangan OPD megabaikan tanggung jawabnya dengan melimpahkan semua tanggung jawabnya dalam mengerjakan laporan keuangan OPD kepada staff keuangan mereka yang lebih menguasai komputer.

Hal ini dikarenakan beberapa Kasubbag keuangan usianya telah lanjut / diatas 40 tahun sehingga mereka tidak menguasai komputer apalagi aplikasi SIPKD. Staff keuangan yang berpendapat bahwa hal tersebut bukan tanggung jawabnya, maka mereka terkesan tidak peduli dengan Laporan Keuangan OPD sehingga mereka mengerjakan Laporan Keuangan OPD dengan tidak maksimal. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dari beberapa Kasubbag Keuangan di OPD Kabupaten Kuantan Singingi yang melalaikan tanggung jawabnya dalam pengimplementasian SAP Berbasis AkruaI dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD mengenai pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, terutama pada saat pengimplementasian SAP berbasis akrual dalam laporan kuangan pemerintah daerah. Dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah beralih dari sistem manual beralih ke sistem aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang. Pada tahun 2019, masih terdapat

beberapa kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu :

1. Kendala Jaringan

Pengelolaan sistem informasi didukung dengan jaringan koneksi internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website. Pemerintah Daerah dalam pembuatan laporan keuangan daerah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi SIPKD. Sedangkan aplikasi ini memerlukan koneksi jaringan internet dan jaringan listrik dalam penggunaannya. Namun sampai saat ini jaringan internet dan jaringan listrik yang tidak stabil selalu menjadi masalah tetap dalam penggunaan aplikasi ini apalagi pada saat pemadaman listrik yang tidak menentu dan cuaca buruk seperti hujan dan angin kencang. Hal ini menimbulkan kendala dalam proses pembuatan maupun proses pengiriman laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Aplikasi SIPKD

Dalam pembuatan laporan keuangan, pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIPKD. Dalam penggunaan aplikasi ini terdapat beberapa kendala yaitu aplikasi yang setiap tahun mengalami penyempurnaan sehingga aplikasi ini harus di *update* (di perbaharui) setiap tahunnya serta diperlukan pelatihan secara berkala agar lebih menguasai aplikasi SIPKD dengan versi terbaru tersebut. Selain itu, kami juga harus memapping tiap tahunnya. Mapping itu adalah menyesuaikan/mencocokkan kode rekening di dalam aplikasi agar semua kode rekening tersebut sesuai dengan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD mengenai kualitas sumber daya manusia di Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, terutama pada saat pengimplementasian SAP berbasis akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemahaman dari sumber daya

manusia di beberapa OPD Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Komputer maupun aplikasi SIPKD yang masih kurang. Laporan keuangan OPD tahun 2019 harus dikerjakan oleh PPK SKPD/Kasubbag Keuangan masing-masing OPD. Tetapi kenyataannya belum sesuai dengan yang diharapkan, beberapa Kasubbag Keuangan OPD megabaikan tanggung jawabnya dengan melimpahkan semua tanggung jawabnya dalam mengerjakan laporan keuangan OPD kepada staff keuangan mereka yang lebih menguasai komputer.

Hal ini dikarenakan beberapa Kasubbag keuangan usianya telah lanjut sehingga mereka tidak menguasai komputer maupun aplikasi SIPKD. Sebanyak 40 % Kasubbag Keuangan di beberapa OPD Kabupaten Kuantan Singingi tidak mampu mengerjakan laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi mereka memiliki staf yang menguasai komputer dan bisa membantu mereka. Staf keuangan yang berpendapat bahwa hal tersebut bukan tanggung jawabnya, maka mereka terkesan tidak peduli dengan Laporan Keuangan OPD sehingga mereka mengerjakan Laporan Keuangan OPD dengan tidak maksimal.

Hal tersebut juga disebabkan oleh keterbatasan dana pemerintah daerah dalam mengadakan pelatihan bagi penyusun laporan keuangan daerah. Pelatihan yang hanya diadakan tidak lebih dari 2 kali dalam setahun oleh pemerintah daerah menyebabkan penyusun laporan keuangan daerah tidak terlalu mampu menguasai secara maksimal aplikasi tersebut karena pada tahap tersebut baru merupakan tahap pengenalan.

Selain itu, aplikasi yang setiap tahun harus diperbaharui menyebabkan perlunya diberikan pelatihan secara berkala agar lebih menguasai aplikasi SIPKD dengan versi terbaru tersebut. Sementara untuk tahun ini beberapa Kasubbag Keuangan tidak paham dengan aplikasi SIPKD versi lama, apalagi aplikasi dengan versi terbaru yang harus di update setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa masih

terdapat berbagai kendala dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia tidak begitu maksimal dalam mendukung pengimplementasian standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Kuantan Singingi.

Alasan lain dilakukannya penelitian ini adalah ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erawatis,dkk (2018) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajian dari aspek berperilaku (Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang). Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Fitrizal (2017) juga melakukan penelitian untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem informasi dan komitmen organisasi terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual Studi empiris pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sedangkan sistem informasi dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Dalam penelitian Yulianto (2018) yang bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian intern terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Studi empiris pada badan pengelola keuangan dan asset daerah Provinsi Jawa Tengah). Adapun hasil

yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Sedangkan dalam penelitian Sari (2018) yang bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem informasi dan komitmen organisasi terhadap kesuksesan implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh). Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, sedangkan komitmen organisasi dan sistem informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Teguh Erawatis dan Danang Kurniawan (2018) berjudul “Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajian dari aspek berperilaku (Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Pada penelitian terdahulu tidak terdapat variabel sumber daya manusia namun pada penelitian sekarang ada variabel kualitas sumber daya manusia. Pada penelitian Kurniawan (2018) Lokasi dan waktu penelitian terdahulu adalah Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan sekarang yaitu Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka topik tentang pengaruh komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi penting untuk diteliti mengingat efisiensi dan efektifitas dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini diharapkan berguna bagi aparatur pemerintahan untuk mengevaluasi indikator yang masih harus diperbaiki serta di kembangkan atas pengimplentasian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada tahun 2014 sebagaimana yang diatur pemerintah dalam PP 71 Tahun 2010. Dengan demikian peneliti memberi judul skripsi ini *“Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implemetasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implemetasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
4. Apakah komitmen organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi secara parsial terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) secara parsial terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi secara parsial terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pengaruh komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi

informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selain itu, juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku kuliah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), ketersediaan teknologi informasi dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2. Bagi pemerintah daerah yaitu untuk dijadikan bahan koreksi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan standar akuntansi berbasis akrual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Rahmat (2010:19), akuntansi adalah sistem pelaporan, perhitungan, pengelompokan, informasi, dan ringkasan-ringkasan yang bersifat kuantitatif mengenai keuangan dengan seluruh transaksi yang sudah dilaksanakan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Sedangkan sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2009:2).

Menurut Sujarweni (2015:1), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yakni akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi desa, akuntansi tempat peribadah (mesjid, gereja, pura, wihara), akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan dan akuntansi kesehatan (Sujarweni, 2015:2).

Menurut *American Accounting Association* dalam Mardiasmo (2009:14) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien

dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Perbedaan	Sektor publik	Sektor Swasta
Tujuan organisasi	<i>Nonprofit motive</i>	<i>Profit motive</i>
Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb	Pembiayaan internal : modal sendiri laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal : uatng bank, obligasi, penerbitan saham

Lanjutan Tabel 2.1

Perbedaan	Sektor publik	Sektor Swasta
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/MPR)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dsb
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk umum	Tertutup untuk publik

Sumber: Mardiasmo, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta adalah (Mardiasmo, 2009:8-13) :

1. Tujuan Organisasi

Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimalkan laba (*profit motive*), sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk meaksimalkan laba tetapi pemberian pelayanan publik (*public service*), seperti : pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).

2. Sumber Pembiayaan

Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan restribusi, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negreri dan obligasi pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Sedangkan sumber pembiayaan sektor swasta lebih fleksibel dan memiliki variasi lebih banyak baik internal maupun eksternal perusahaan.

3. Pola pertanggungjawaban

Manajemen sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan

(pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public funds*).

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan hierarkis sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel.

5. Karakteristik anggaran

Pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena merupakan rahasia perusahaan.

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta, (Mardiasmo, 2009:13):

1. Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif.
3. Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen.
4. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Hery (2016:3), Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Mursyidi (2013:19), Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, baik dalam bentuk laporan keuangan (*financial accountability*) maupun laporan kinerja (*performance accountability*). Hal ini disebabkan karena pemerintah bertanggung jawab atas amanat yang diberikan oleh publik kepada pemerintah daerah dalam penggunaan dana publik.

Menurut Tanjung (2015:2), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Menurut Erlina,dkk (2017:19), Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan OPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), salah satu tugasnya yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Suhanda, 2007:48). PPKD juga melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka menyajikan informasi keuangan daerah. Setiap OPD akan menyampaikan laporan keuangannya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Suhanda, 2007:71).

Setiap akhir tahun, PPKD akan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara mengkonsolidasikan/menggabungkan laporan keuangan masing-masing OPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan selanjutnya disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Suhanda, 2007:72). Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK disampaikan ke DPRD untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.1.3 Unsur-unsur Laporan Keuangan Daerah

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 60, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan

anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 61-83, unsur-unsur laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 61, menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

1.4.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 63, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.4.2.3 Neraca

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 64, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

1.4.2.4 Laporan Operasional

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 78-79, laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 80-81, Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 82, Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 83, catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 84, Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 90-97, pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan adalah :

1. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan

pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual

Sebelum tahun 2005, Pemerintah di Indonesia masih menggunakan basis kas dalam penyajian laporan keuangan. Hal tersebut sangat tradisional dan tanpa adanya Standar Akuntansi Pemerintah. Era reformasi keuangan negara ditandai dengan terbitnya 3 paket Undang-undang keuangan negara yang mengamanatkan untuk dibuatnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berbasis akrual. Salah satunya, pasal 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menegaskan ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menegaskan kembali tentang ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Akhirnya terbitlah PP No. 24 Tahun 2005 tentang *SAP cash toward accrual/CTA* (basis kas menuju akrual). Mulai tahun 2005, pemerintah sudah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah berdasar Standar Akuntansi Pemerintah meskipun masih berbasis kas menuju akrual karena perlu waktu untuk menyiapkan segala elemen guna mendukung penerapan basis akrual secara penuh.

Untuk melaksanakan amanah paket undang-undang keuangan negara, pada tahun 2010 akhirnya diterbitkan Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2010) yang ditetapkan

pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Berdasarkan PP ini, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh selambat-lambatnya tahun 2015.

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Namun, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama transisi dan diterapkan oleh entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana tercantum dalam lampiran II dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual yaitu pada tahun 2015.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual dan akuntansi berbasis akrual.

1. Akuntansi berbasis kas (cash based accounting)

Menurut PP No.71 Tahun 2010, Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggung jawaban manajemen atas asset dan kewajiban (Erlina, dkk, 2017:12).

2. Akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual based accounting)

Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Menurut PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

3. Akuntansi berbasis akrual (accrual based accounting)

Menurut PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan daya pada suatu entitas. Menurut Erlina,dkk (2017:12), sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modern. Keberhasilan selandia baru menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam

akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban. PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

Menurut Ratmono dan Sholihin (2017:11), secara terperinci, menurut kerangka konseptual SAP, basis akuntansi untuk setiap akun laporan keuangan adalah sebagai berikut. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan dalam laporan operasional (pendapatan-LO), beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk pendapatan-LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO (Ratmono dan Sholihin, 2017:11).

Menurut Ratmono dan Sholihin (2017:11), dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar secara ringkas, basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan (Ratmono dan Sholihin, 2017:11).

Tabel 2.2
Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut SAP Kas Menuju Akrual dan SAP Akrual

Keterangan	SAP Kas Menuju Akrual	SAP Akrual
Komponen Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Pokok : 1. LRA 2. Neraca 3. CaLK Laporan Opsional : 1. Laporan Kineja Keuangan (LKK) 2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Laporan Keuangan Pokok : 1. LRA 2. Laporan Perubahan SAL 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. LAK 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. CaLK
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (<i>statutory</i>)	Tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (<i>statutory</i>)
Laporan Perubahan SAL	Tidak ada laporan tersendiri	Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : 1. Saldo Anggaran Lebih awal 2. Penggunaan Saldo

		Anggaran Lebih; 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan; 4. Anggaran tahun berjalan; 5. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun
--	--	--

Lanjutan tabel 2.2

Keterangan	SAP Kas Menuju AkruaI	SAP AkruaI
		Sebelumnya dan lain-lain; 6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Neraca	Akun Ekuitas disebut sebagai Ekuitas Dana yang terbagi : 1. Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih 2. Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaan yang tertanam dalam investasi jangka panjang, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang 3. Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan	Tidak lagi disebut Ekuitas Dana, hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

	perundang-undangan.	
Laporan Arus Kas	1. Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	1. Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum

Lanjutan tabel 2.2

Keterangan	SAP Kas Menuju Akrual	SAP Akrual
	2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran	2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
Laporan Kinerja Keuangan/ Laporan Operasional	1. Bersifat opsional 2. Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual	Merupakan Laporan Keuangan Pokok
Laporan Perubahan Ekuitas	Bersifat opsional	Merupakan Laporan Keuangan Pokok
Catatan atas Laporan Keuangan	1. Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK	1. Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE

Sumber : Ratmono dan Sholihin, 2017

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), isi pokok SAP berbasis akrual dan perbedaannya dengan SAP berbasis kas menuju akrual adalah sebagai berikut :

1. Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diacu dalam Pasal 70 ayat (2), mengatur bahwa pengakuan pendapatan dan belanja pada APBN/APBD menggunakan basis akrual. Di lain pihak, praktik penganggaran dan pelaporan pelaksanaannya pada sebagian terbesar negara, termasuk Indonesia, menggunakan basis kas. Untuk itu KSAP menyusun SAP Berbasis Akrual yang mencakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), sebagaimana dicantumkan pada PSAP 2, dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan finansial, yang pada PSAP 12 memfasilitasi pencatatan pendapatan dan beban dengan basis akrual.
2. Laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Bagi Entitas Pelaporan di Pemerintah Pusat).

Laporan finansial yang berbasis akrual terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai
4. Laporan Operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I Standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terdiri dari:

1. Lampiran I. 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2. Lampiran I. 02. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
3. Lampiran I. 03. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
4. Lampiran I. 04. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
5. Lampiran I. 05. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
6. Lampiran I. 06. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
7. Lampiran I. 07. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
8. Lampiran I. 08. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
9. Lampiran I. 09. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
10. Lampiran I. 10. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
11. Lampiran I. 11. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
12. Lampiran I. 12. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
13. Lampiran I. 13. PSAP 12 tentang Laporan Operasional

2.1.6 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan salah satu topik yang akan selalu menjadi tinjauan baik bagi pihak manajemen dalam sebuah organisasi maupun bagi para peneliti yang khususnya berfokus kepada perilaku manusia. Komitmen organisasional menjadi penting khususnya bagi organisasi yang ada saat ini dikarenakan dengan melihat sejauh mana keberpihakan seorang karyawan terhadap organisasi, dan sejauh mana karyawan tersebut berniat untuk

memelihara keanggotaannya terhadap organisasi maka dapat diukur pula sebaik apa saja komitmen seorang karyawan terhadap organisasinya.

Menurut Yusuf dan Syarif (2018:32), komitmen organisasi adalah sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi, dengan cara tetap bertahan dalam organisasi, membantu mencapai tujuan organisasi dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan alasan apapun. Hal ini menunjukkan suatu organisasi seperti organisasi pemerintahan harus memiliki komitmen dalam segala tindakannya, terutama dalam pengelolaan laporan keuangan berbasis akrual dimana dana tersebut merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.

Komitmen organisasi adalah sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat individu betah dan tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan kelangsungan organisasi. Komitmen organisasi diungkap dengan skala komitmen organisasi.

Untuk menerapkan akrual basis, diperlukan komitmen dari pimpinan yang selanjutnya komitmen tersebut harus ditransferkan ke seluruh pelaksana. Bukti adanya komitmen pimpinan dan pemahaman para pelaksana tersebut diekspresikan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun infrastruktur yang dapat menunjang implementasi basis akrual. Menurut Sinambela (2019:173), dukungan manajemen puncak sangat penting, tetapi dukungan mereka saja tidaklah cukup dibutuhkan juga dukungan dan komitmen dari pimpinan menengah dan pimpinan tingkat bawah dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi.

Menurut Sinambela (2019:168), apabila organisasi memiliki sumber

manusia (SDM) yang professional, berkualitas berkomitmen, dan berintegrasi yang baik dipastikan organisasi tersebut dapat berkembang dengan pesat. Jika tidak ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua maka Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua tidak akan terimplementasi dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak berkualitas.

Menurut Yusuf dan Syarif (2018:32), komitmen mengacu pada keterikatan dan loyalitas, ini adalah kekuatan relative dengan identifikasi individu dari dan keterlibatan dalam sebuah organisasi tertentu, ini terdiri dari tiga faktor:

- 1) Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.
- 2) Sebuah keyakinan kuat, dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.
- 3) Kesiapan untuk mengerahkan upaya yang cukup besar untuk kepentingan organisasi.

Tiga fitur dari perilaku yang penting dalam mengikat individu untuk tindakan mereka yaitu: visibilitas tindakan, sampai sejauh mana hasil yang tidak dapat dibatalkan, dan sejauh mana orang tersebut melakukan tindakan secara sukarela, komitmen dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan dengan tujuan dan kepentingan organisasi melalui cara-cara seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Yusuf dan Syarif (2018:34) mengemukakan tiga komponen tentang komitmen organisasi:

1. Komitmen efektif (affective commitment), ini berarti komitmen efektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan pada, dan keterlibatan karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat

akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin melakukan hal tersebut.

Dengan kata lain, keterlibatan emosional seseorang pada organisasinya berupa perasaan cinta pada organisasi. Komitmen afektif merupakan ikatan secara emosional yang melekat pada seorang karyawan untuk mengidentifikasi dan melibatkan dirinya dengan organisasi. Komitmen afektif ini juga dapat dikatakan sebagai penentu yang penting atas dedikasi dan loyalitas seorang karyawan. Kecenderungan seorang karyawan yang memiliki komitmen afektif yang tinggi, dapat menunjukkan rasa memiliki atas perusahaan, meningkatnya keterlibatan dalam aktivitas organisasi, keinginan untuk mencapai tujuan organisasi dan keinginan untuk dapat tetap bertahan dalam organisasi.

2. Komitmen Kontinyu (continuance commitment) berkaitan dengan persepsi seseorang atas biaya dan resiko dengan meninggalkan organisasi saat ini, artinya, terdapat dua aspek pada komitmen kontinyu yaitu: melibatkan pengorbanan pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans sejalan dengan pendapat beckers yaitu bahwa komitmen kontinuans adalah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternative tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar.

Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan. Komitmen kontinyu berkaitan dengan persepsi seseorang atas biaya dan resiko dengan persepsi seseorang atas biaya dan resiko dengan meninggalkan organisasi saat ini. Artinya, terdapat dua aspek pada komitmen kontinyu yaitu: melibatkan

pengorbanan pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi.

Komitmen kontinuans sejalan dengan pendapat becker yaitu bahwa komitmen kontinuans adlah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternative tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar, karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain.

3. Komitmen Normatif merupakan dimensi moral yang didasarkan pada perasaan wajib dan tanggung jawab pada organisasi yang mempekerjakannya. Dengan kata lain, komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti, karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi. Komponen komitmen ini sebagai tekanan normative yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk bertingkah laku tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat organisasi. Oleh karena itu, tingkah laku karyawan didasari pada adanya keyakinan tentang “apa yang besar” serta berkaitan dengan masalah moral.

2.1.7 Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi (2010:40), pengertian sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)

- 2) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- 3) Sumber daya manusia (SDM adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Menurut Nawawi (2010:41), ketiga pengertian tersebut tidaklah bertentangan, meskipun pengertian yang pertama dan kedua sifatnya sangat sederhana. Untuk itu akan diketengahkan beberapa identifikasi mengenai unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur manusia yang dilihat dari potensinya disebut sumber daya, berbeda dengan sumber daya material. Manusia sebagai sumber daya bersifat potensial/abstrak, tidak dapat diukur dengan jumlahnya. Potensi itu merupakan proses dan hasil interaksi substansi fisik dan psikis, berupa kemampuan mencipta, kemampuan mengkhayal kemampuan berfikir yang menghasilkan gagasan, kreativitas, inisiatif, kemampuan memecahkan masalah, memprediksi, wawasan ke masa depan, keterampilan dan keahlian, dan lain-lain.

Kemampuan itu sangat tinggi nilainya, jika dikongkritkan menjadi kegiatan bisnis yang kompetitif, sebagai kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua manusia. Oleh karena itu jumlah yang banyak tidak akan berarti apabila bukan terdiri dari SDM yang potensial dan berkualitas. Sebaliknya seorang atau beberapa orang saja, yang potensial dan berkualitas dimiliki oleh organisasi/perusahaan, maka akan mampu mengantarkan organisasinya dalam mencapai sukses.

- 2) Manusia adalah sumber daya yang harus disediakan pembiayaan nya untuk imbalan atas pekerjaan dan jasa-jasanya kepada organisasi/perusahaan.

Imbalan tersebut pada dasarnya merupakan penghargaan, dan sekaligus ganjaran agar memberikan kontribusinya secara maksimal pada usaha mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Oleh karena itu jumlah dana yang dibayarkan berupa kompensasi langsung dan tidak langsung akan menjadi sangat besar, yang secara langsung akan mempengaruhi harga dasar produk (barang atau jasa) yang dipasarkan. Dengan kata lain pembiayaan (cost) tersebut. Secara otomatis berfungsi sebagai modal.

Dalam kenyataannya pembiayaan itu menjadi bertambah besar apabila SDM sebagai sumber daya merupakan tenaga kerja langka. Yang keterampilan dan keahliannya sangat terbatas dipasar tenaga kerja. SDM seperti itu mengharuskan perusahaan memprogramkan dan membayarkan kompensasinya secara bersaing dengan organisasi/perusahaan sejenis. Oleh karena itulah SDM dilingkungan perusahaan ditempatkan juga sebagai modal (non material/non finansial), yang harus diperhitungkan dalam pembiayaan (cost), agar tujuannya untuk meraih keuntungan dapat diwujudkan.

- 3) Didalam ketiga pengertian diatas dapat terdapat juga unsur ketiga yakni potensi nyata (real) secara fisik dan psikis yang dimiliki manusia sebagai makhluk yang unik dan kompleks. Manusia sebagai sumber daya yang berbeda dari sumber daya lainnya berupa sumber daya material dan finansial bagi sebuah perusahaan (organisasi). SDM merupakan subyek yang aktif dan menentukan, bukan obyek yang pasif dan ditentukan sebagaimana kedua jenis sumber daya lainnya.

Dengan mempergunakan potensi fisik dan psikis yang dimilikinya SDM melakukan berbagai kegiatan, yang salah satu di antaranya disebut bekerja, sebagai usaha mewujudkan eksistensi organisasi/perusahaan. Untuk itu manusia mempergunakan sumber daya

material dan finansial sebagai alat guna mencapai tujuan strategis organisasi/perusahaan. Dalam usaha SDM memaksimalkan pencapaian tujuan tersebut, dipenghujung abad XX dan memasuki abad XXI dalam bekerja diperlukan kecepatan dan ketepatan menghimpun dan mengolah.

Menurut Sinambela (2019:3), Sumber daya manusia dalam setiap organisasi baik publik maupun bisnis, adalah sumber daya yang utama, di samping berbagai sumber daya lainnya. Hal itu diakibatkan manusia menjadi pelaku utama yang akan menggerakkan berbagai sumber daya yang dimaksud. Oleh sebab itu, dalam mengelola sumber daya tersebut, SDM-nya haruslah berkualitas. Dengan kata lain, berbagai sumber daya yang melimpah ruah jika tidak diikuti dengan kompetensi SDM akan menjadi percuma karena tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Sinambela (2019:436), sebuah tim dapat menciptakan sistem jika anggotanya dapat bekerja secara sinergis. Tetapi kesuksesan tergantung pada kinerja yang ditunjukkan oleh anggotanya, yang mencakup peningkatan kemampuan komunikasi, manajemen waktu, manajemen proyek, ilmu pengetahuan/keahlian, dan keterampilan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas SDM yang dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan di bidang-bidang yang dibutuhkan termasuk akuntansi.

Sumber daya manusia memiliki peran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Tidak ada proses organisasi tanpa sumber daya manusia. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, tersedianya modal dan sumber daya lainnya, tanpa sumber daya manusia yang memadai, sangat mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang dimaksud tentu saja adalah SDM yang berkualitas. Saat ini, semakin banyak diperlukan SDM yang berkualitas dari sudut penguasaan

keterampilan atau keahlian bekerja dengan teknologi canggih, atau yang mampu menghasilkan laporan keuangan yang diproses dengan teknologi teknologi canggih (Nawawi, 2010:157).

Menurut Sinambela (2019:419), dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki SDM dapat melakukan seluruh pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dan dapat mengemukakan gagasan-gagasan dan inovasi baru untuk pengembangan organisasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam OPD, juga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengelola keuangan pemerintah daerah dengan efektif dan efisien terutama dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Sumber daya manusia dalam OPD harus mampu meningkatkan keterampilan, kemampuan maupun pengetahuan dalam bidang teknologi informasi terutama yang berkaitan dengan bidang akuntansi dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Keberhasilan organisasi ditentukan oleh kualitas kinerja sumber daya manusianya baik secara individu maupun tim. Menurut Sinambela (2019:419), sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energy tinggi, seperti *intelligence*, *creavity*, dan *imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga, otot, dan sebagainya. Untuk itu, organisasi perlu mengerahkan seluruh potensi sumber daya manusianya dalam mencapai tujuan.

Menurut Nawawi (2010:43), sumber daya material dan finansial perlu disediakan dan dipergunakan dalam jumlah yang memadai untuk keperluan pengelolaan SDM. Perlu diyakini bahwa melalui SDM yang berkualitas dan

mampu memberikan kontribusi yang terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Berarti akan diperoleh keuntungan yang berimbang atau melebihi nilai sumber daya material dan finansial yang telah digunakan untuk mengelolah SDM. Untuk itulah diperlukan usaha secara terus-menerus dalam meningkatkan kualitas SDM dilingkungan suatu organisasi/ perusahaan.

Tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja itu, sangat ditentukan oleh pengembangan kemampuan para pekerja, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, kerjasama dalam tim, pemecahan masalah dan berbagai kemampuan manajerial lainnya (Nawawi, 2010:292). Dari pengembangan dan peningkatan itu, diharapkan hasil sebagai muaranya adalah terwujudnya efektivitas yang tinggi.

2.1.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Maryono dan Istiana (2009:3), kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Kata informasi dapat diartikan berita yang mengandung maksud tertentu. Manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang selalu ingin dibagikan kepada orang lain. Pengalaman atau pengetahuan yang dikomunikasikan kepada orang lain tersebut merupakan pesan atau informasi. Teknologi informasi adalah tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi (Maryono dan Istiana, 2009:3).

Teknologi informasi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang perkembangannya semakin pesat dari tahun ke tahun. Menurut Prasajo dan Riyanto (2011:4), teknologi informasi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang

mencakup berbagai hal seperti : sistem computer *hardware* dan *software*, LAN (local area network), MAN (metropolitan area network), WAN (wide area network), sistem informasi manajemen (SIM), sistem telekomunikasi dan lain-lain. Berdasarkan pendapat para ahli dan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi teknologi informasi adalah ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis computer dan perkembangannya sangat pesat.

Teknologi informasi saat ini dapat meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2010:196).

Menurut Maryono dan Istiana (2009:4), sebagai suatu sistem, komputer terbentuk dari tiga komponen pokok. Setiap komponen memiliki fungsi tersendiri, saling terkait dan bergabung membentuk sebuah sistem komputer. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Perangkat keras (*hardware*). Perangkat keras tersendiri atas empat komponen dasar, yaitu perangkat masukan (*input unit*). Perangkat pemroses (*central processing unit*), perangkat penyimpan (*storage unit*), dan perangkat keluaran (*output unit*).
- 2) Perangkat lunak (*software*), perangkat lunak berwujud program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu perangkat lunak sistem operasi (*operating system software*) dan perangkat lunak aplikasi (*application software*).
- 3) Manusia (*brainware*), yaitu orang yang menjalankan dan mengendalikan *hardware* dan *software*.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan

penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2010:45), namun pengimplementasian teknologi informasi memerlukan biaya yang tidak murah. Terlebih lagi apabila teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pengelolaan sistem informasi ini didukung dengan jaringan koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi memanfaatkan teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, aplikasi SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Teknologi Informasi digunakan agar memudahkan dan mempercepat pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga meningkatkan efektifitas maupun efisiensi dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua dalam laporan keuangan pemerintah daerah dari sebelumnya yang masih diterapkan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi sangat berperan penting pada pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Jika dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua tidak menggunakan teknologi informasi maka pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain terkait dengan kondisi perangkat keras (*hardware*) yang belum memadai, perangkat lunak (*software*) yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang belum mampu mengaplikasikan teknologi, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang dapat menjadi faktor yang membuat pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua yang diatur dalam PP 71 Tahun 2010.

Hal diatas menandakan bahwa teknologi informasi dapat bermanfaat untuk mendorong kesuksesan dari tujuan organisasi pemerintah. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi tentunya pekerjaan untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah dan cepat. Pada akhirnya pengambilan keputusan pun tidak memakan waktu lama dan tentunya dasar informasi yang tersaji untuk pengambilan keputusan sudah ternilai handal.

2.2 Penelitian terdahulu

Ada banyak penelitian yang membicarakan tentang *accrual basic*, namun dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesiapan SAP berbasis akrual dan implementasi SAP berbasis akrual. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi literatur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M Luthfi Iznillah (2015)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir)	1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,000 < 0,05$ 2. Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,002 < 0,05$ 3. Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,651 > 0,05$ 4. Komunikasi Tidak Berpengaruh Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,988 > 0,05$
2.	Ida Bagus Gede Permana, dan I Dewa	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Pada	1. Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Dengan Nilai

Lanjutan Tabel 2.3

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	------	------------------	------------------

	Peneliti		
	Nyoman Wiratmaja (2016)	Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	Signifikansi Sebesar 0,028 < 0,05 2. Komitmen Organisasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar 0,033 < 0,05 3. Sistem Informasi Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar 0,028 < 0,05
3	Rian Fitrizal (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan	1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar 0,000 < 0,05 2. Sistem Informasi Tidak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar 0,133 > 0,05 3. Komitmen Organisasi Tidak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi

Lanjutan Tabel 2.3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	------------------	------------------	------------------

			Sebesar 0,635 > 0,05
4	Annisa Intan Pratiwi, Sri Rahayu, Dan Djusnimar Zutlisna (2017)	Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Kota Bandung	1. Teknologi Informasi Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,000 < 0,05$ 2. Sumber Daya Manusia Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,023 < 0,05$ 3. Komitmen Secara Parsial Tidak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,492 > 0,05$ 4. Komunikasi Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,013 < 0,05$
5	Rosy Armaini (2017)	Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan	1. Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Provinsi Sumatera

Lanjutan Tabel 2.3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Penerapan	Selatan Dengan Nilai Signifikansi

		Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Sebesar $0,000 < 0,05$ 2. Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,006 < 0,05$
6.	Kadek Nila Karyogis dan I Made Pande Dwiana Putra (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua! di Kabupaten Bangli	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua! dengan nilai signifikansi uji t $0,000$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. 2. Komitmen organisasi berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua! dengan nilai signifikansi uji t $0,000$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua!, dengan nilai signifikansi uji t $0,001$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
7.	Tri Wulandari, Nur	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen	1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Terhadap Keberhasilan SAP Berbasis Akrua!

Lanjutan Tabel 2.3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Hidayati Dan M.	Organisasi Dan Sistem Pengedalian	Akrua! Di OPD Kabupaten Malang Dengan Nilai Sebesar $0,037 < 0,05$

	Cholid Mawardi (2018)	Inter Terhadap Keberhasilan SAP Berbasis Akrua Di OPD Kabupaten Malang	2. Komitmen Organisasi Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Keberhasilan SAP Berbasis Akrua Di OPD Kabupaten Malang Dengan Nilai Sebesar $0,428 > 0,05$ 3. Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Signifikan Terhadap Keberhasilan SAP Berbasis Akrua Di OPD Kabupaten Malang Dengan Nilai Signifikansi $0,000 < 0,05$
8.	Nia Permata Sari (2018)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kesuksesan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh)	1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,001 < 0,05$ 2. Sistem Informasi Tidak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,271 > 0,05$ 3. Komitmen Organisasi Tidak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,347 > 0,05$

Lanjutan Tabel 2.3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Andika Yulianto (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh Terhadap Implementasi Standar Akuntansi

		Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Empiris Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Jawa Tengah)	Pemerintah Berbasis AkruaI Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,280 > 0,05$ 2. Komitmen Organisasi Tidak Berpengaruh Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,193 > 0,05$ 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,825 > 0,05$ 4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Dengan Nilai Signifikansi Sebesar $0,006 < 0,05$
10.	Teguh Erawatis dan Danang Kurniawan (2018)	Penerapan sistem akuntansi berbasis akruaI: kajian dari aspek berperilaku (Satuan Kerja Pemerintah Daerah	1. Komitmen organisasi mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,001 ($p < 0,05$). Dengan demikian hipotesis pertama diterima. 2. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai tingkat signifikansi

Lanjutan Tabel 2.3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		(SKPD) Kabupaten Magelang)	sebesar 0,015 ($p < 0,05$). Dengan demikian hipotesis kedua diterima.

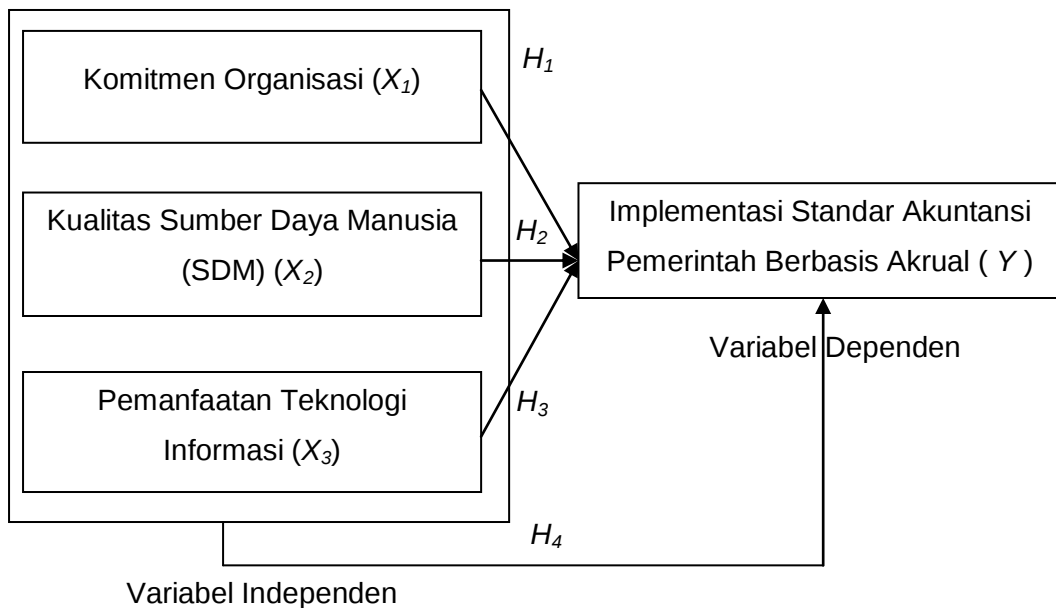
Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2020.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang hal-hal yang mempengaruhi implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu tiga variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan yaitu komitmen organisasi (X_1), kualitas sumber daya manusia (X_2) dan pemanfaatan teknologi informasi (X_3), sedangkan variabel dependen yaitu implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (Y). Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas.

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Teguh Erawatis dan Danang Kurniawan (2018) dan Nia Permata Sari (2018)

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- H₂ : Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- H₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- H₄ : Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual

Untuk menerapkan akrual basis, diperlukan komitmen dari pimpinan yang selanjutnya komitmen tersebut harus ditransferkan ke seluruh pelaksana. Bukti adanya komitmen pimpinan dan pemahaman para pelaksana tersebut diekspresikan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun infrastruktur yang dapat menunjang implementasi basis akrual. Menurut Sinambela (2019:173), dukungan manajemen puncak sangat penting, tetapi dukungan mereka saja tidaklah cukup dibutuhkan juga dukungan dan

komitmen dari pimpinan menengah dan pimpinan tingkat bawah dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi.

Menurut Sinambela (2019:168), apabila organisasi memiliki sumber manusia (SDM) yang professional, berkualitas berkomitmen, dan berintegritas yang baik dipastikan organisasi tersebut dapat berkembang dengan pesat. Jika tidak ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua maka Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua tidak akan terimplementasi dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak berkualitas.

Penelitian tentang komitmen organisasi dalam kaitannya dengan pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pernah dilakukan oleh Erawatis,dkk (2018) dengan hasil yang diperoleh komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Fitriзал (2017) dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam penelitian Yulianto (2018) diperoleh hasil penelitian yaitu komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.5.2 Pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual

Menurut Sinambela (2019:3), Sumber daya manusia dalam setiap organisasi baik publik maupun bisnis, adalah sumber daya yang utama, di samping berbagai sumber daya lainnya. Hal itu diakibatkan manusia menjadi pelaku utama yang akan menggerakkan berbagai sumber daya yang dimaksud. Oleh sebab itu, dalam mengelola sumber daya tersebut, SDM-nya haruslah berkualitas. Dengan kata lain, berbagai sumber daya yang melimpah ruah jika tidak diikuti dengan kompetensi SDM akan menjadi percuma karena tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Sinambela (2019:3), jumlah modal yang besar ketika tidak dapat dikelola manusia dengan baik, akan menjadi modal yang mati tidak akan bertambah, bahkan kemungkinan yang terjadi akan sebaliknya, yakni akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan SDM yang berkualitas dalam mengelola keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Penelitian tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kaitannya dengan pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pernah dilakukan oleh Sari (2018). Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrual. Namun dalam penelitian Fitrizal (2017) memperoleh hasil penelitian yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam penelitian Yulianto (2018) diperoleh hasil penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.5.3 Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual

Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Secara umum suatu teknologi informasi dapat memberikan banyak manfaat dalam membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya antara lain transaksi yang diproses dengan cepat, penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, data yang dapat disimpan dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2010:85)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan

akses antar unit kerja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pengelolaan sistem informasi ini didukung dengan jaringan koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, aplikasi SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam kaitannya dengan pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pernah dilakukan oleh Erawatis,dkk (2018) dengan hasil yang diperoleh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Fitrizal (2017) dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu sistem informasi dan komitmen organisasi

tidak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam penelitian Yulianto (2018) diperoleh hasil penelitian yaitu pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.5.4 Pengaruh komitmen organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual

Menurut Sinambela (2019:168), apabila organisasi memiliki sumber manusia (SDM) yang professional, berkualitas, berkomitmen, dan berintegritas yang baik dipastikan organisasi tersebut dapat berkembang dengan pesat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu organisasi termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) sangat membutuhkan komitmen organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah.

Menurut Sinambela (2019:419), sumber daya manusia memiliki peran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Tidak ada proses organisasi tanpa sumber daya manusia. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, tersedianya modal dan sumber daya lainnya, tanpa sumber daya manusia yang memadai, sangat mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang dimaksud tentu saja adalah SDM yang berkualitas. Selain SDM yang berkualitas, pemerintah juga membutuhkan

komitmen yang tinggi dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah. Dukungan manajemen puncak sangat penting, tetapi dukungan mereka saja tidaklah cukup dibutuhkan juga dukungan dan komitmen dari pimpinan menengah dan pimpinan tingkat bawah (Sinambela, 2019:172).

Penelitian tentang komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kaitannya dengan pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pernah dilakukan oleh Erawatis,dkk (2018) dengan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Sedangkan dalam penelitian Fitrizal (2017) diperoleh hasil penelitian yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sedangkan sistem informasi dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Dalam penelitian Yulianto (2018) memperoleh hasil penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sedangkan dalam penelitian Sari (2018), hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, sedangkan komitmen organisasi dan sistem informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₄ : Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variable independen yaitu komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap variable dependen yaitu implementasi standar akuntansi berbasis akrual.

Menurut Jakaria (2015:1), penelitian kuantitatif adalah kegiatan ilmiah yang menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data numerik dan analisis menggunakan pendekatan statistik. Paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002:12).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian adalah dari bulan Oktober tahun 2019 sampai Bulan Juni 2020. Adapun waktu penelitian pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Pelaksanaan Kegiatan									
Bulan	Okt 19	Nov 19	Des 19	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	Mei 20	Jun 20
Proposal Penelitian									
Pencarian Data Awal									
Penyusunan Proposal									
Pengajuan Proposal									
Penyerahan Proposal Kepada Dosen Pembimbing									
Bimbingan Proposal									
Seminar Proposal									
Revisi Proposal									
Penyebaran Kuisioner dan Pengumpulan Data									
Bimbingan Skripsi									
Ujian Skripsi									

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:115), populasi (*population*) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut elemen populasi (*population element*). Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan OPD Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga total populasi dalam penelitian ini berjumlah 161 orang. Adapun rincian populasi pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Daftar Jumlah Populasi pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	10 orang
2	Sekretariat DPRD	12 orang
3	Inspektorat	5 orang
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	5 orang
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	5 orang
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10 orang
7	Badan Pendapatan Daerah	9 orang
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 orang
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4 orang
10	Dinas Kesehatan	5 orang
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 orang
12	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan	6 orang
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	6 orang
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5 orang
15	Dinas Lingkungan Hidup	6 orang

Lanjutan tabel 3.2

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 orang
17	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6 orang
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6 orang

19	Dinas Pertanian	5 orang
20	Dinas Perhubungan	6 orang
21	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persediaan	4 orang
22	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	4 orang
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 orang
24	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	5 orang
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	6 orang
26	Rumah Sakit Umum Daerah	10 orang
Jumlah Populasi		161 orang

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Usman dan Akbar (2011:181), sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling. Sampel merupakan sebagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro dan Supomo, 2002:115). Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode pemilihan sampel nonprobabilitas (*nonprobability sampling*) tepatnya Pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*). Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:131), Pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) digunakan karena peneliti mempunyai tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada organisasi perangkat daerah yang bekerja di bagian keuangan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan masing-masing OPD, Bendahara Pengeluaran masing-masing OPD, Bendahara Penerimaan masing-masing OPD dan staff keuangan masing-masing OPD. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan di OPD, alasan di pilihnya

Kasubbag Keuangan untuk di jadikan sampel dalam penelitian ini dikarenakan Kasubbag Keuangan harus memiliki komitmen dalam menyusun Laporan Keuangan OPD yang harus sesuai SAP berbasis akrual dan diolah serta dilaporkan menggunakan aplikasi SIPKD. Sehingga dapat di asumsikan bahwa Kasubbag Keuangan mengerti dan memahami tentang implementasi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menggunakan aplikasi.

2. Bendahara Pengeluaran di OPD, alasan di pilihnya bendahara pengeluaran untuk di jadikan sampel dalam penelitian ini dikarenakan bendahara pengeluaran terlibat langsung dalam pencatatan belanja baik belanja Operasional, belanja barang dan jasa maupun belanja modal serta sudah mempunyai pengalaman dalam memanfaatkan teknologi informasi seperti penyusunan laporan keuangan OPD menggunakan aplikasi SIPKD. Sehingga dapat di asumsikan bahwa Bendahara Pengeluaran mengerti dan memahami tentang implementasi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
3. Bendahara Penerimaan di OPD, alasan dipilihnya Bendahara penerimaan sebagai sampel dalam penelitian ini di karenakan bendahara penerimaan terlibat langsung terhadap pencatatan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh OPD serta sudah mempunyai pengalaman dalam memanfaatkan teknologi informasi seperti penyusunan laporan keuangan OPD menggunakan aplikasi SIPKD. Sehingga dapat di asumsikan bahwa Bendahara Penerimaan mengerti dan memahami tentang implementasi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
4. Staff keuangan di OPD, alasan dipilihnya staff keuangan sebagai sampel dalam penelitian ini di karenakan staff keuangan ikut berperan dalam membantu kassubbag keuangan dalam menyusun laporan keuangan OPD

menggunakan aplikasi SIPKD. Sehingga dapat di asumsikan bahwa staff keuangan mengerti dan memahami tentang implementasi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Sehingga jumlah sampel pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Daftar Jumlah Sampel pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	4 orang
2	Sekretariat DPRD	4 orang
3	Inspektorat	4 orang
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	4 orang
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4 orang
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4 orang
7	Badan Pendapatan Daerah	4 orang
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 orang
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4 orang
10	Dinas Kesehatan	4 orang
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 orang
12	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan	4 orang
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	4 orang

Lanjutan tabel 3.3

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 orang
15	Dinas Lingkungan Hidup	4 orang
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 orang
17	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	4 orang
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4 orang
19	Dinas Pertanian	4 orang
20	Dinas Perhubungan	4 orang
21	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persediaan	4 orang
22	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	4 orang

	Perindustrian	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 orang
24	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	4 orang
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	4 orang
26	Rumah Sakit Umum Daerah	4 orang
Jumlah Responden		104 orang

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4 Jenis Data dan Sumber data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi” adalah data subyek. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden) (Indriantoro dan Supomo, 2002:145). Data subyek diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan, yaitu : lisan (verbal), tertulis dan ekspresi (Indriantoro dan Supomo, 2002:145).

Data subyek dalam penelitian ini dalam bentuk tanggapan tertulis dari para responden berdasarkan sampel yang telah ditetapkan. Respon tertulis diberikan sebagai tanggapan/jawaban atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti yang berhubungan dengan komitmen organisasi,

ketersediaan teknologi informasi dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data (Jakaria, 2015:9). Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data (Indriantoro dan Supomo, 2002:146). Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi” adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2002:146).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari informan yang terdapat pada beberapa lokasi yang telah dijadikan wilayah penelitian sesuai dengan populasi dan sampel penelitian yang telah dijelaskan diatas. Melalui cara ini, peneliti memutuskan untuk terjun sendiri dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah data untuk mendapatkan data yang relevan dan riil.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:152). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:152), metode survei adalah metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode survei yang digunakan yaitu pertanyaan tertulis dalam bentuk kuisisioner. Kuisisioner merupakan suatu pertanyaan peneliti dan jawaban responden yang dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisisioner (Indriantoro dan Supomo, 2002:154). Kuisisioner umumnya dijawab oleh responden dan peneliti hanya menyebarkan dan mengumpulkan hasilnya (Jakaria, 2015:17).

Peneliti mendatangi langsung ke lokasi penelitian menyebarkan kuisisioner kepada masing-masing sampel yang telah ditentukan. Peneliti memberikan kuisisioner yang dimasukkan kedalam amplop lalu memberikan jangka waktu dalam pengembalian kuisisioner.

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori dan konsep pada buku, literature, ataupun artikel akuntansi yang sehubungan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga mengakses data melalui website dan situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mencari hubungan/pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka variabel didefenisikan secara operasional. Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel. Variabel tersebut adalah komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diukur menggunakan skala likert. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:104), skala likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, objek atau kejadian tertentu.

3.6.1 Variabel Penelitian

3.6.1.1 Variabel Dependen

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:62), variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Y)

Menurut PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 dimana telah digunakan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Oktavianty (2017) antara lain :

1. Pengakuan Pendapatan
2. Pengakuan Beban
3. Laporan Operasional

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner. Variabel ini diukur dengan menggabungkan/mengkombinasikan kuesioner yang telah dikembangkan oleh Oktavianty (2017) yang terdiri dari 9 item pertanyaan dan ditambahkan dengan kuesioner Arif (2018) sebanyak 4 item pertanyaan sehingga menjadi 13 item pertanyaan. Dengan diterbitkannya PP 71 Tahun 2010, kebijakan pemerintah untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual akan diukur melalui skala ordinal dimana 1 sampai 5 jawaban

yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat setuju.

3.6.1.2 Variabel Independen

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:62), variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan/mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi.

1. Komitmen Organisasi

Menurut Yusuf dan Syarif (2018:32), komitmen organisasi merupakan suatu kekuatan yang memiliki sifat yang sangat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya dalam organisasi. Indikator komitmen organisasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Yusuf dan Syarif (2018:34) dimana telah digunakan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Oktavianty (2017) antara lain :

1. Komitmen Efektif (*Affective Commitment*)
2. Komitmen Kontinyu/berkelanjutan (*Continuance Commitment*)
3. Komitmen Normatif (*Normative Commitment*)

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner. Variabel ini diukur dengan menggabungkan/mengkombinasikan kuesioner yang telah dikembangkan oleh Oktavianty (2017) yang terdiri dari 6 item pertanyaan dan ditambahkan dengan kuesioner Madjid (2016) sebanyak 3 item pertanyaan sehingga menjadi 9 item pertanyaan. Pengukuran dilakukan melalui 5 poin skala likert yaitu: nilai (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat setuju.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Nawawi (2010:40), sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). Indikator sumber daya manusia yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Sinambela (2018:419) dimana telah digunakan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Oktavianty (2017) antara lain :

1. Sumber daya yang memiliki keterampilan
2. Sumber daya yang memiliki pengetahuan
3. Sumber daya yang memiliki kemampuan

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner. Variabel ini diukur dengan menggabungkan/mengkombinasikan kuesioner yang telah dikembangkan oleh Oktavianty (2017) yang terdiri dari 7 item pertanyaan dan ditambahkan dengan kuesioner Madjid (2016) sebanyak 5 item pertanyaan sehingga menjadi 12 item pertanyaan. Pengukuran dilakukan melalui 5 poin skala likert yaitu: nilai (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat setuju.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wilkinson (2005:196), Teknologi Informasi adalah kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Indikator sumber daya manusia yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Prasajo dan Riyanto (2011:4) dimana telah digunakan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Oktavianty (2017) antara lain :

1. Kelengkapan perangkat keras (*hardware*)

2. Kelengkapan perangkat lunak (*software*)
3. Kelengkapan jaringan (*network*)

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner. Variabel ini diukur dengan menggabungkan/mengkombinasikan kuesioner yang telah dikembangkan oleh Oktavianty (2017) yang terdiri dari 6 item pertanyaan dan ditambahkan dengan kuesioner Pratiwi (2018) sebanyak 5 item pertanyaan sehingga menjadi 11 item pertanyaan. Pengukuran dilakukan melalui 5 poin skala likert yaitu: nilai (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat setuju.

3.6.2 Defenisi Operasional

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:96), defenisi operasional merupakan penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel yang dapat diuji. *Construct* merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena kehidupan nyata yang diamati (Indriantoro dan Supomo, 2002:61). Penjabaran variabel ke dalam indikator-indikator yang akan mendasari penyusunan kuesioner dapat dilihat pada table 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Defenisi Operasional

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	Komitmen Organisasi (X_1)	Komitmen organisasi merupakan suatu kekuatan yang memiliki sifat yang sangat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya dalam organisasi (Yusuf dan	1. Komitmen Efektif (<i>Affective Commitment</i>) 2. Komitmen Kontinyu/Berkelanjutan (<i>Continuance Commitment</i>) 3. Komitmen Normatif

Lanjutan tabel 3.4

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
		Syarif, 2018:32).	(<i>Normative Commitment</i>) (Yusuf dan Syarif, 2018:34).
2.	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2)	Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan) (Nawawi, 2010:40)	1. Sumber daya yang memiliki Keterampilan 2. Sumber daya yang memiliki pengetahuan 3. Sumber daya yang memiliki kemampuan (Sinambela, 2018:419)
3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)	Teknologi Informasi adalah kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. (Wilkinson, 2010:196)	1. Kelengkapan perangkat keras (<i>hardware</i>) 2. Kelengkapan perangkat lunak (<i>software</i>) 3. Kelengkapan jaringan (<i>network</i>) (Prasojo dan Riyanto, 2011:4)
4.	Implementasi SAP berbasis akrual (Y)	SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan	1. Pengakuan Pendapatan 2. Pengakuan Beban 3. Laporan Operasional (PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8)

Lanjutan tabel 3.4

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
----	----------	-------------------	-----------

		basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (PP No. 71 Tahun 2010).	
--	--	---	--

Sumber : Data olahan tahun 2019.

3.7 Instrumen Penelitian

Menurut Jakaria (2015:17), instrumen penelitian adalah suatu alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan halnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengubah data–data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah *Summated Rating Method: Likert Scale* atau skala likert.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:104), skala likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, objek atau kejadian tertentu. Skala likert digunakan untuk mengukur komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual., maka responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Setiap pertanyaan tersebut disertai dengan 5 alternatif jawaban yang harus dipilih responden dan setiap jawaban tersebut dinilai dengan angka. Menurut Ghazali (2018:47), skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :

1. Jawaban sangat setuju (SS) diberi skor : 5

2. Jawaban setuju (S) diberi skor : 4
3. Jawaban kurang setuju (KS) diberi skor : 3
4. Jawaban tidak setuju (TS) diberi skor : 2
5. Jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi skor : 1

Sementara itu, menurut Sudjana (2000:79), kriteria penilaian terhadap rata-rata indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan dengan skala likert yang digunakan yaitu :

- a. 1,00 – 1,80 = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
- b. > 1,80 – 2,60 = Responden memiliki penilaian yang tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
- c. > 2,60 – 3,40 = Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
- d. > 3,40 – 4,20 = Responden memiliki penilaian yang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
- e. > 4,20 – 5,00 = Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan

distribusi). Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data, peringkasan data, penyamplingan dan penyajian hasil peringkasan tersebut. Statistik deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel-variabel dalam penelitian ini. Untuk mengetahui deskripsi data diperlukan ukuran yang lebih ringkas yaitu ringkasan statistik dengan bantuan SPSS versi 25. Ukuran yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, median dan deviasi standar.

3.8.2 Uji Kualitas Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat, untuk itu keabsahan dan keandalan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya.

3.8.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2018:51), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dan suatu kuisiioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisiioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisiioner tersebut. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur sesuai dengan apa yang ingin diukur (Jakaria, 2015:103). Hal ini menunjukkan bahwa validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisiioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian dilakukan secara statistik dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25.

Data penelitian diuji kevaliditasnya dengan menggunakan korelasi *bivariate* dengan bantuan program aplikasi pengolah data. Hasil analisis korelasi *bivariate* dapat diketahui dengan melihat nilai *pearson correlation* (r_{hitung}). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk

degree of freedom (df) = $n - 2$ dengan alpha 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2018:51). Pengujian validitas dilakukan dengan kriteria menurut Ghozali (2018:52) adalah sebagai berikut :

- a. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid,
- b. Jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:45), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk dan suatu kuesioner akan dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Jakaria (2015:101), reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, artinya pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang konsisten (*reliable*), dapat memberikan hasil yang relatif sama jika dilakukan pengukuran yang berbeda waktunya (Jakaria, 2015:101).

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *one shot* yaitu pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan (Ghozali, 2018:46). Dalam hal ini SPSS versi 25 memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik dengan *cronbach alpha* (α). Menurut Sujarweni (2014:192), kriteria penilaian untuk pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *cronbach alpha* > 0,60 maka dinyatakan reliabel
- b. Jika nilai *cronbach alpha* < 0,60 maka dinyatakan reliabel

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam perhitungan regresi mungkin akan terjadi kesalahan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang dibentuk. Untuk itu, perlu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) (Jakaria, 2015:157). Berikut adalah uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini:

3.8.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal. Menurut Jakaria (2015:157), normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel kekeliruan model berdistribusi normal atau tidak. Dengan kata lain, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis.

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah Grafik Normal P-P Plot dengan bantuan SPSS versi 25. Menurut Jakaria (2015:158), pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal. Menurut Jakaria (2015:158), dasar pengambilan keputusan Grafik Normal P-P Plot adalah :

1. Jika data menyebar di garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.8.3.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2018:107), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dimana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Jakaria (2015:159), multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan linear atau korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Pengujian dilakukan secara statistik dengan bantuan SPSS versi 25.

Menurut Ghazali (2018:107), multikolinieritas dapat diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, dapat dilihat dari:

- (1) *tolerance value*.
- (2) nilai *variance inflation factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai *tolerance* kurang dari atau sama dengan 0,10 ($\leq 0,10$) atau sama dengan nilai VIF lebih dari atau sama dengan 10 (≥ 10) maka terjadi gejala multikolinearitas sedangkan jika nilai *tolerance* lebih dari atau sama dengan 0,10 ($\geq 0,10$) atau nilai VIF kurang dari atau sama dengan 10 (≤ 10) maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2018:108).

3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2018:137), Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dimana jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Jakaria (2015:161), heteroskedastisitas menunjukkan adanya ragam kekeliruan yang tidak sama sehingga berdampak pada tidak efisiennya penaksir. Dengan demikian, Model

regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot yang diperoleh dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Menurut Ghozali (2018:138), dasar pengambilan keputusan grafik scatterplot yaitu :

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.3.4 Uji Autokorelasi

Menurut Jakaria (2015:159), autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error dengan error periode sebelumnya dimana asumsi klasik ini tidak boleh terjadi. Menurut Ghozali (2018:111), autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dalam model regresi diharapkan tidak terjadi problem autokorelasi.

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan *Durbin Watson* yang diperoleh dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah apabila angka yang ditunjukkan dari nilai *Durbin Watson* berada antara -2 sampai dengan +2, maka dapat dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan uji *Durbin Watson* (DW) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika angka DW dibawah -2 berarti autokorelasi positif.
- b. Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi

positif.

- c. Jika angka DW diatas +2, berarti ada autokorelasi positif.

3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang diperoleh dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana dengan dua atau lebih variabel bebas yang digunakan sebagai prediktor dan satu variabel tergantung yang diprediksi (Sarwono, 2015:130). Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen dan koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan (Ghozali, 2018:95).

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

a = Konstanta

$\beta_{(1,2,3)}$ = Koefisien regresi masing-masing X

X_1 = Variabel independen 1 (Komitmen Organisasi)

X_2 = Variabel independen 2 (Kualitas Sumber Daya Manusia)

X_3 = Variabel independen 3 (Pemanfaatan Teknologi Informasi)

e = *Error*

3.8.5 Uji Hipotesis

Menurut Usman dan Akbar (2011:181), hipotesis adalah pertanyaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis. Pengujian

hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Dalam uji hipotesis dilakukan beberapa pengujian yaitu :

3.8.5.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut Ghazali (2018:98), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka analisis dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output aplikasi SPSS versi 25. Menurut Ghazali (2018:99) dasar pengambilan keputusan uji t adalah :

- 1) Signifikan bila $p \text{ value/nilai signifikan} < \alpha (0,05)$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak (ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen)
- 2) Tidak signifikan bila $p \text{ value/ nilai signifikan} > \alpha (0,05)$, sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima (tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen)

Tingkat signifikansi/alpha (α) yang digunakan 5% atau 0,05 artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas/tingkat keakuratan 95% atau toleransi kesalahan 5% (Usman dan Akbar, 2011:123).

3.8.5.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2018:98), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka analisis dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output aplikasi SPSS versi 25. Menurut Ghozali (2018:98) dasar pengambilan keputusan uji F adalah :

- 1) Signifikan bila p value/nilai signifikan $< \alpha$ (0,05), sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak (ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen)
- 2) Tidak signifikan bila p value/ nilai signifikan $> \alpha$ (0,05), sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima (tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen)

Tingkat signifikansi/alpha (α) yang digunakan 5% atau 0,05 artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas/tingkat keakuratan 95% atau toleransi kesalahan 5% (Usman dan Akbar, 2011:123).

3.8.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018:97), koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel dependen yang digunakan sebagai ukuran besarnya pengaruh (dalam persen) semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen (Algifari, 2013:260).

Hal tersebut menunjukkan bahwa analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai interpretasi nilai R dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Interpretasi Nilai R²

Besarnya nilai R²	Interpretasi
Antara 0,800 sampai dengan 1,00	Tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,800	Cukup
Antara 0,400 sampai dengan 0,600	Agak Rendah
Antara 0,200 sampai dengan 0,400	Rendah
Antara 0,000 sampai dengan 0,200	Sangat Rendah

Sumber : Arikunto, 2010.

Besarnya koefisien determinasi (R²) akan menunjukkan persentase pengaruh komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonom daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah Kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki Ibu Kota di Taluk Kuantan. Melalui Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kota Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kota di Teluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten definitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti dan Kecamatan Benai. Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012, jumlah Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi tercatat menjadi 15 daerah Kecamatan, yakni Kecamatan Benai, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Inuman, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Pangean, Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau.

Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai pejabat Bupati definitif Kuantan Singingi periode 2001–2006 berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2001. Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi. Berikut adalah daftar bupati yang memimpin Kabupaten Kuantan Singingi sejak pertama berdiri sampai sekarang.

Tabel 4.1
Daftar Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Drs. H. Rusdji S Abrus	1999 – 2001	Sebelumnya pejabat bupati kemudian menjadi bupati definitif
2	Drs. H. Asrul Ja'afar	2001 – 2005	Sebelumnya menjadi wakil bupati, kemudian menggantikan bupati yang meninggal dunia.
3	H. Sukarmis	2006 – 2015	Menjabat selama 2 periode
4	Drs. H. Mursini, M.Si	2016 – Sekarang	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2020.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis yang terdiri dari

dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5 – 300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400 – 800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan. Pada Kabupaten Kuantan Singingi terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'–1°00' Lintang Selatan dan 101°02'–101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan dan 199 Kelurahan dengan jumlah penduduk 314.276. Batas wilayah kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan, Provinsi Riau.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoeкономи and

geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada di bagian selatan Provinsi Riau yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama Pelabuhan Kuala Enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata.

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang kepala daerah yakni Drs. H. Mursini, M.Si dan wakilnya H. Halim. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki visi dan misi sebagai berikut :

4.1.3.1 Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021”.

Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diatas adalah sebagai berikut :

1. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.

2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
3. Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

4.1.3.2 Misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata.
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

4.1.4 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Susunan perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 26. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe A merupakan unsur Staf membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan publik.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe B merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe A merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
2. Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, pemukiman dan pertanahan.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

7. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan ketahanan pangan.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
11. Dinas Pertanian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
12. Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian.
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pustaka dan kearsipan.
16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
17. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran.

Badan daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

1. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
2. Badan Kepegawaia, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pengembangan.
3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
6. Badan Kesatuan Politik dan Bangsa tergabung dalam urusan pemerintahan lain, perangkat daerah ini hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan politik dan bangsa.

4.1.5 Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pegawai pada organisasi perangkat daerah yang bekerja di bagian keuangan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan masing-masing OPD, Bendahara Pengeluaran masing-masing OPD, Bendahara Penerimaan masing-masing OPD dan staff keuangan masing-masing OPD Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 161 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) digunakan karena peneliti mempunyai tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak (Indriantoro dan Supomo, 2013:131).

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel tersebut adalah sebagai

berikut:

5. Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan di OPD, alasan di pilihnya Kasubbag Keuangan untuk di jadikan sampel dalam penelitian ini dikarenakan Kasubbag Keuangan harus memiliki komitmen dalam menyusun Laporan Keuangan OPD yang harus sesuai SAP berbasis akrual dan diolah serta dilaporkan menggunakan aplikasi SIPKD. Sehingga dapat di asumsikan bahwa Kasubbag Keuangan mengerti dan memahami tentang implementasi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menggunakan aplikasi.
6. Bendahara Pengeluaran di OPD, alasan di pilihnya bendahara pengeluaran untuk di jadikan sampel dalam penelitian ini dikarenakan bendahara pengeluaran terlibat langsung dalam pencatatan belanja baik belanja Operasional, belanja barang dan jasa maupun belanja modal serta sudah mempunyai pengalaman dalam memanfaatkan teknologi informasi seperti penyusunan laporan keuangan OPD menggunakan aplikasi SIPKD. Sehingga dapat di asumsikan bahwa Bendahara Pengeluaran mengerti dan memahami tentang implementasi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
7. Bendahara Penerimaan di OPD, alasan dipilihnya Bendahara penerimaan sebagai sampel dalam penelitian ini di karenakan bendahara penerimaan terlibat langsung terhadap pencatatan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh OPD serta sudah mempunyai pengalaman dalam memanfaatkan teknologi informasi seperti penyusunan laporan keuangan OPD menggunakan aplikasi SIPKD. Sehingga dapat di asumsikan bahwa Bendahara Penerimaan mengerti dan memahami tentang implementasi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
8. Staff keuangan di OPD, alasan dipilihnya staff keuangan sebagai sampel

dalam penelitian ini di karenakan staff keuangan ikut berperan dalam membantu kassubbag keuangan dalam menyusun laporan keuangan OPD menggunakan aplikasi SIPKD. Sehingga dapat di asumsikan bahwa staff keuangan mengerti dan memahami tentang implementasi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 104 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner secara langsung. Berikut ini adalah tabel tingkat pengembalian kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Total	Persentase (%)
Kuisisioner yang dikirim	104	100 %
Kuisisioner yang kembali dan dapat diolah	96	92,3 %
Kuisisioner yang tidak kembali	8	7,7 %

Sumber : Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa penyebaran kuesioner dilakukan sebanyak 104 kuesioner kepada 104 responden yang memenuhi kriteria yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020 sampai 26 April 2020. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah berjumlah 96 kuesioner dengan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 92,3 % dan kuesioner yang tidak kembali berjumlah 8 kuisisioner sebesar 7,7%. Tingginya tingkat pengembalian kuesioner dikarenakan kuesioner disebarkan secara langsung.

4.1.6 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pada organisasi perangkat daerah yang bekerja di bagian keuangan yang terdiri dari Kepala Sub

Bagian (Kasubbag) Keuangan masing-masing OPD, Bendahara Pengeluaran masing-masing OPD, Bendahara Penerimaan masing-masing OPD dan staff keuangan masing-masing OPD Kabupaten Kuantan Singingi yang masuk dalam kriteria yang telah ditentukan di awal dan sebanyak 96 responden yang mengembalikan kuesioner. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden terbagi dalam 2 kelompok dari 96 responden yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-Laki	49	51
Perempuan	47	49
Total	96	100,0

Sumber : Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 49 orang atau 51% sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 47 orang atau 49%. Kesimpulan dari tabel diatas bahwa jumlah responden terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 49 orang sementara perempuan sebanyak 47 orang.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia responden terbagi dalam 6 kelompok dari 96 responden yaitu di bawah 30 tahun, 31 sampai 35 tahun, 36 sampai 40 tahun, 41 sampai 45 tahun, 46 sampai 50 tahun dan di atas 51 tahun. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan diperoleh karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 30 Tahun	11	11,5
31 - 35 Tahun	18	18,8
36 - 40 Tahun	23	24
41 - 45 Tahun	28	29,2
46 – 50 Tahun	12	12,5
> 51	4	4,2
Total	96	100,0

Sumber : Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 11 orang atau 11,5%, responden yang berusia 31 sampai 35 tahun berjumlah 18 orang atau 18,8%, responden yang berusia 36 sampai 40 tahun berjumlah 23 orang atau 24%, responden yang berusia 41 sampai 45 tahun berjumlah 28 orang atau 29,2%, dan responden yang berusia 46 sampai 50 tahun berjumlah 12 orang atau 12,5%, sedangkan responden yang berusia diatas 51 tahun berjumlah 4 orang atau 4,2%.

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak berdasarkan usia terdapat pada usia 41 sampai 45 tahun sebanyak 28 orang dan jumlah responden terkecil berada pada usia diatas 51 tahun yaitu sebanyak 4 orang.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan terbagi dalam 5 kelompok dari 96 responden yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat, Diploma (D3), Strata 1 (Sarjana), Strata 2 (Master) dan Strata 3 (Doktor). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SLTA	14	14,6
D3	2	2,1
S1	73	76
S2	7	7,3
S3	0	0
Total	96	100,0

Sumber : Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 14 orang atau 14,6%. Dan responden dengan tingkat pendidikan diploma (D3) berjumlah 2 orang atau 2,1%, responden dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 73 orang atau 76%, sedangkan responden dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 7 orang atau 7,3% serta responden dengan tingkat pendidikan Strata 3 (S3) tidak ada.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah responden terbanyak yaitu dengan tingkat pendidikan S1 (Strata 1) sebanyak 73 orang dan jumlah responden terkecil yaitu dengan tingkat pendidikan S3 (Strata 3) dimana tidak ada responden dengan tingkat pendidikan S3.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan responden terbagi dalam 4 kelompok dari 96 responden yaitu Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan staff keuangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh karakteristik responden berdasarkan jabatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Kasubbag Keuangan	24	25,0
Bendahara Pengeluaran	21	21,9
Bendahara Penerimaan	18	18,8
Staff Keuangan	33	34,4
Total	96	100,0

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden yang berasal dari Kasubbag Keuangan berjumlah 24 orang atau 25,0%, dan responden yang berasal dari Bendahara Pengeluaran berjumlah 21 orang atau 21,9%, responden yang berasal dari Bendahara Penerimaan berjumlah 18 orang atau 18,8%, serta responden yang berasal dari Staff Keuangan berjumlah 33 orang atau 34,4%.

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak berdasarkan jabatan terdapat pada jabatan staff keuangan sebanyak 33 orang dan jumlah responden terkecil berada pada jabatan Bendahara Penerimaan yaitu sebanyak 18 orang.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja responden terbagi dalam 3 kelompok dari 96 responden yaitu dibawah 5 tahun , 5 sampai 10 tahun dan lebih dari 10 tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh karakteristik responden berdasarkan masa kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 5 tahun	21	21,9
5 sampai 10 tahun	34	35,4
> 10 tahun	41	42,7
Total	96	100,0

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan masa kerja kurang dari 5 tahun berjumlah 21 orang atau 21,9%, dan responden dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun berjumlah 34 orang atau 35,4%, responden dengan masa kerja lebih dari 10 tahun berjumlah 41 orang atau 42,7%.

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak berdasarkan masa kerja terdapat pada masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 41 orang dan jumlah responden terkecil berada pada kurang dari 5 tahun yaitu sebanyak 21 orang.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada 96 jawaban kuesioner responden di Kabupaten Kuantan Singingi yang memenuhi kriteria. Dengan beberapa kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya.

4.2.1.1 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua (Y)

Ada 13 pernyataan di dalam kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua (Y). Adapun tanggapan responden terhadap variable Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden terhadap Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua (Y)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
Y ₁	1,0%	3,1%	29,2%	62,5%	4,2%	100%	3,66	Baik
Y ₂	-	3,1%	28,1%	59,4%	9,4%	100%	3,75	Baik
Y ₃	1,0%	-	28,1%	58,3%	12,5%	100%	3,81	Baik
Y ₄	1,0%	3,1%	19,8%	59,4%	16,7%	100%	3,88	Baik
Y ₅	1,0%	-	17,7%	71,9%	9,4%	100%	3,89	Baik
Y ₆	1,0%	-	12,5%	60,4%	26,0%	100%	4,10	Baik
Y ₇	2,1%	-	15,6%	68,8%	13,5%	100%	3,92	Baik
Y ₈	1,0%	-	14,6%	66,7%	17,7%	100%	4,00	Baik
Y ₉	2,1%	-	9,4%	63,5%	25,0%	100%	4,09	Baik
Y ₁₀	1,0%	-	12,5%	64,6%	21,9%	100%	4,06	Baik
Y ₁₁	1,0%	-	18,8%	58,3%	21,9%	100%	4,00	Baik
Y ₁₂	2,1%	-	4,2%	61,5%	63,5%	100%	4,22	Sangat Baik
Y ₁₃	2,1%	-	11,5%	63,5%	22,9%	100%	4,05	Baik
Rata-rata variabel	3,96							Baik

Sumber : Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi standar akuntansi berbasis akrual terdiri dari 2 indikator dan 13 item pertanyaan. Untuk item mereka telah mengakui pendapatan LO pada saat hak atas pendapatan sudah ada walaupun kas belum diterima (Y₁) dan item mereka selalu

mencatat penerbitan surat ketetapan pajak sebagai pendapatan LO meskipun wajib pajak belum menyeter (Y_2) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 62,5% (Y_1) dan 59,4% (Y_2).

Rata-rata item sebesar 3,66 (Y_1) dan 3,75 (Y_2) artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa item mereka telah mengakui pendapatan LO pada saat hak atas pendapatan sudah ada walaupun kas belum diterima dan item mereka selalu mencatat penerbitan surat ketetapan pajak sebagai pendapatan LO meskipun wajib pajak belum menyeter adalah baik.

Sementara untuk item mereka selalu mencatat transaksi pajak tahun 2018 yang diterima tahun 2019 dengan mendebet akun pendapatan-LO dan mengkredit akun piutang pendapatan (Y_3), item pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan (Y_4), dan item mereka dapat membedakan antara pendapatan-LO dan pendapatan LRA (Y_5) sebagian responden menjawab setuju yaitu sebesar 58,3% (Y_3), 59,4% (Y_4) dan 71,9% (Y_5).

Rata-rata item sebesar 3,81 (Y_3), 3,88 (Y_4) dan 3,89 (Y_5) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa item mereka selalu mencatat transaksi pajak tahun 2018 yang diterima tahun 2019 dengan mendebet akun pendapatan-LO dan mengkredit akun piutang pendapatan dan item pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta item mereka dapat membedakan antara pendapatan-LO dan pendapatan LRA adalah baik.

Sementara untuk item mereka selalu mengakui transaksi beban pada saat timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai meskipun kas belum keluar (Y_6), item setiap transaksi pembelian ATK akan saya catat dalam akun kas yang dikredit setiap ada transaksi beban (Y_7) dan item Setiap pemakaian ATK selalu dicatat sebagai beban ATK (Y_8) serta item mereka dapat

membedakan antara beban dan belanja (Y_9) sebagian responden menjawab setuju yaitu sebesar 60,4% (Y_6), 68,8% (Y_7) dan 66,7% (Y_8) serta 63,5% (Y_9).

Dan rata-rata per item sebesar 4,10 (Y_6), 3,92 (Y_7) dan 4,00 (Y_8) serta 4,09 (Y_9) yang artinya item mereka selalu mengakui transaksi beban pada saat timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai meskipun kas belum keluar, item setiap transaksi pembelian ATK akan saya catat dalam akun kas yang dikredit setiap ada transaksi beban dan item Setiap pemakaian ATK selalu dicatat sebagai beban ATK serta item mereka dapat membedakan antara beban dan belanja adalah baik.

Dan untuk item mereka menyajikan laporan operasional sesuai SAP berbasis Akrua (Y_{10}), item mereka selalu menyajikan Laporan Operasional berdasarkan sumber data yang diperlukan (Y_{11}), item mereka selalu mengklasifikasikan pendapatan operasional dan pendapatan non operasional sesuai format Laporan Operasional (Y_{12}) dan item selisih lebih harga jual aset tetap dengan nilai buku diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional (Y_{13}) sebagian responden menjawab setuju yaitu sebesar 64,6% (Y_{10}), 58,3% (Y_{11}) dan 63,5% (Y_{13}) serta jawaban sangat setuju sebesar 63,5% (Y_{12}).

Rata-rata per item sebesar 4,06 (Y_{10}), 4,00 (Y_{11}) dan 4,22 (Y_{12}) serta 4,05 (Y_{13}) yang artinya item mereka menyajikan laporan operasional sesuai SAP berbasis Akrua, item mereka selalu menyajikan Laporan Operasional berdasarkan sumber data yang diperlukan dan item selisih lebih harga jual aset tetap dengan nilai buku diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional adalah baik. Sementara untuk item mereka selalu mengklasifikasikan pendapatan operasional dan pendapatan non operasional sesuai format Laporan Operasional adalah sangat baik.

Dari 13 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dimana item mereka

selalu mengklasifikasikan pendapatan operasional dan pendapatan non operasional sesuai format Laporan Operasional (Y_{12}) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,22. Sedangkan item mereka telah mengakui pendapatan LO pada saat hak atas pendapatan sudah ada walaupun kas belum diterima (Y_1) merupakan item dengan nilai rata-rata yang terendah sebesar 3,66.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) sebesar 3,96. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori baik.

4.2.1.2 Komitmen Organisasi (X_1)

Ada 9 pernyataan di dalam kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur variabel komitmen organisasi (X_1). Adapun tanggapan responden terhadap variabel komitmen organisasi (X_1) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden terhadap Variabel Komitmen Organisasi (X_1)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
$X_{1.1}$	1,0%	6,3%	19,8%	51,0%	21,9%	100%	3,86	Baik
$X_{1.2}$	2,1%	6,3%	18,8%	54,2%	18,8%	100%	3,81	Baik
$X_{1.3}$	1,0%	3,1%	16,7%	57,3%	21,9%	100%	3,96	Baik
$X_{1.4}$	1,0%	7,3%	20,8%	50,0%	20,8%	100%	3,82	Baik

X _{1.5}	1,0%	8,3%	20,8%	49,0%	20,8%	100%	3,80	Baik
X _{1.6}	2,1%	12,5%	18,8%	44,8%	21,9%	100%	3,72	Baik
X _{1.7}	3,1%	2,1%	10,4%	61,4%	22,9%	100%	3,99	Baik
X _{1.8}	1,0%	5,2%	14,6%	53,1%	26,0%	100%	3,98	Baik
X _{1.9}	1,0%	3,1%	14,6%	56,3%	25,0%	100%	4,01	Baik
Rata-rata variabel	3,88							Baik

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan informasi keuangan daerah terdiri dari 3 indikator dan 9 item pertanyaan. Untuk item mereka merasa senang dalam menjalani karier di organisasi khususnya dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual (X_{1.1}), item mereka merasa bahwa masalah di organisasi adalah masalah saya juga terutama masalah yang berkaitan dengan implementasi SAP berbasis akrual (X_{1.2}) dan item organisasi ini sangat berarti bagi mereka (X_{1.3}) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 51,0% (X_{1.1}), 54,2% (X_{1.2}) dan 57,3% (X_{1.3}).

Rata-rata per item sebesar 3,86 (X_{1.1}), 3,81 (X_{1.2}) dan 3,96 (X_{1.3}) yang artinya item mereka merasa senang dalam menjalani karier di organisasi khususnya dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual, item mereka merasa bahwa masalah di organisasi adalah masalah saya juga terutama masalah yang berkaitan dengan implementasi SAP berbasis akrual dan item organisasi ini sangat berarti bagi mereka adalah baik.

Dan untuk item mereka merasa tidak memiliki alternatif pekerjaan lain untuk dapat meninggalkan organisasi ini (X_{1.4}), item mereka merasa rugi jika sekarang mereka berhenti bekerja dari organisasi ini (X_{1.5}) dan item hidup mereka akan kacau secara materi jika sekarang mereka keluar dari organisasi ini (KO 06) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 50,0% (X_{1.4}), 49,0% (X_{1.5}) dan 44,8% (X_{1.6}).

Rata-rata per item sebesar 3,82 ($X_{1.4}$), 3,80 ($X_{1.5}$) dan 3,72 ($X_{1.6}$) yang artinya item mereka merasa tidak memiliki alternatif pekerjaan lain untuk dapat meninggalkan organisasi ini, item mereka merasa rugi jika sekarang mereka berhenti bekerja dari organisasi ini dan item hidup mereka akan kacau secara materi jika sekarang mereka keluar dari organisasi ini adalah baik.

Dan untuk item mereka merasa bahwa kesuksesan organisasi memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka khususnya dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual ($X_{1.7}$), item mereka sangat peduli dan bersedia bekerja keras dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab khususnya dalam menyukseskan implementasi SAP berbasis akrual ($X_{1.8}$) dan item mereka akan menerima setiap pekerjaan yang diberikan demi organisasi agar implementasi SAP berbasis akrual sukses ($X_{1.9}$) sebagian responden menjawab setuju sebesar 61,4% ($X_{1.7}$), 53,1% ($X_{1.8}$) dan 56,3 ($X_{1.9}$).

Rata-rata per item sebesar 3,99 ($X_{1.7}$), 3,98 ($X_{1.8}$) dan 4,01 ($X_{1.9}$) yang artinya item mereka merasa bahwa kesuksesan organisasi memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka khususnya dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual, item mereka sangat peduli dan bersedia bekerja keras dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab khususnya dalam menyukseskan implementasi SAP berbasis akrual dan mereka akan menerima setiap pekerjaan yang diberikan demi organisasi agar implementasi SAP berbasis akrual sukses adalah baik.

Dari 9 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel komitmen organisasi dimana item mereka akan menerima setiap pekerjaan yang diberikan demi organisasi agar implementasi SAP berbasis akrual sukses ($X_{1.9}$) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,01. Sedangkan item hidup mereka akan kacau secara materi jika sekarang mereka keluar dari

organisasi ini ($X_{1.6}$) merupakan item dengan nilai rata-rata yang terendah sebesar 3,72.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel komitmen organisasi dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item komitmen organisasi (X_1) sebesar 3,88. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa komitmen organisasi pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori baik.

4.2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2)

Ada 12 pernyataan di dalam kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur variabel kualitas sumber daya manusia (X_2). Adapun tanggapan responden terhadap variabel kualitas sumber daya manusia (X_2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Tanggapan Responden terhadap Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
$X_{2.1}$	-	2,1%	16,7%	56,3%	25,0%	100%	4,04	Baik
$X_{2.2}$	-	1,0%	3,1%	62,5%	33,3%	100%	4,28	Sangat Baik
$X_{2.3}$	-	1,0%	13,5%	56,3%	29,2%	100%	4,14	Baik
$X_{2.4}$	-	1,0%	17,7%	61,5%	19,8%	100%	4,00	Baik
$X_{2.5}$	-	1,0%	7,3%	50,0%	41,7%	100%	4,32	Sangat Baik
$X_{2.6}$	-	1,0%	5,2%	54,2%	39,6%	100%	4,32	Sangat Baik
$X_{2.7}$	-	2,1%	10,4%	59,4%	28,1%	100%	4,14	Baik
$X_{2.8}$	-	-	12,5%	58,3%	29,2%	100%	4,17	Baik
$X_{2.9}$	-	2,1%	8,3%	54,2%	35,4%	100%	4,23	Sangat Baik

X _{2.10}	-	3,1%	7,3%	57,3%	32,3%	100%	4,19	Baik
X _{2.11}	-	1,0%	2,1%	61,5%	35,4%	100%	4,31	Sangat Baik
X _{2.12}	-	2,1%	8,3%	57,3%	32,3%	100%	4,20	Baik
Rata-rata variabel	4,20							Baik

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia terdiri dari 3 indikator dan 12 item pertanyaan. Untuk item mereka memiliki keterampilan fisik yang bisa digunakan dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual (X_{2.1}) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 56,3% (X_{2.1}) dengan rata-rata item sebesar 4,04 (X_{2.1}) yang artinya item mereka memiliki keterampilan fisik yang bisa digunakan dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual adalah baik.

Dan item mereka memiliki keterampilan akademik yang bisa digunakan dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual (X_{2.2}) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 62,5% (X_{2.2}) dengan rata-rata item sebesar 4,28 (X_{2.2}) yang artinya item mereka memiliki keterampilan akademik yang bisa digunakan dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual adalah sangat baik.

Dan item mereka memiliki keterampilan menggunakan komputer dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual (X_{2.3}) dan item mereka memiliki keterampilan menggunakan aplikasi SIPKD dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual (X_{2.4}) sebagian responden menjawab setuju 56,3% (X_{2.3}) dan 61,5% (X_{2.4}). Rata-rata per item 4,14 (X_{2.3}), 4,00 (X_{2.4}) artinya item mereka memiliki keterampilan menggunakan komputer dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual dan item mereka memiliki keterampilan menggunakan aplikasi SIPKD dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual adalah baik.

Dan item mereka telah menyelesaikan tingkat pendidikan: pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk melakukan tugas-tugas dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual ($X_{2.5}$) dan item mereka memiliki pengetahuan tentang tupoksi dan uraian tugas di bidang keuangan dalam implementasi SAP berbasis akrual ($X_{2.6}$) sebagian responden menjawab setuju 50,0% ($X_{2.5}$) dan 54,2% ($X_{2.6}$).

Rata-rata per item 4,32 ($X_{2.5}$) dan 4,32 ($X_{2.6}$) artinya item mereka telah menyelesaikan tingkat pendidikan: pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk melakukan tugas-tugas dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual dan item mereka memiliki pengetahuan tentang tupoksi dan uraian tugas di bidang keuangan dalam implementasi SAP berbasis akrual adalah sangat baik.

Dan item mereka memiliki pengetahuan tentang pengakuan dan transaksi keuangan dalam menyukkseskan implementasi SAP berbasis akrual ($X_{2.7}$) dan item mereka memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan daerah dalam menyukkseskan implementasi SAP berbasis akrual ($X_{2.8}$) sebagian responden menjawab setuju 59,4% ($X_{2.7}$) dan 58,3% ($X_{2.8}$).

Rata-rata per item 4,14 ($X_{2.7}$) dan 4,17 ($X_{2.8}$) artinya item mereka memiliki pengetahuan tentang pengakuan dan transaksi keuangan dalam menyukkseskan implementasi SAP berbasis akrual dan item mereka memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan daerah dalam menyukkseskan implementasi SAP berbasis akrual adalah baik.

Sementara item mereka memiliki kecerdasan (intelektual, emosional, spiritual, dan sosial) yang selalu mereka gunakan untuk bekerja dalam menyukkseskan implementasi SAP berbasis Akrual ($X_{2.9}$) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 54,2% ($X_{2.9}$) dengan rata-rata item sebesar 4,23 ($X_{2.9}$) yang artinya item mereka memiliki kecerdasan (intelektual, emosional,

spiritual, dan sosial) yang selalu mereka gunakan untuk bekerja dalam menyelesaikan implementasi SAP berbasis Akrua adalah sangat baik.

Untuk item mereka memiliki energi yang besar/memiliki bakat yang besar untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua ($X_{2.10}$) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 57,3% ($X_{2.10}$) dengan rata-rata item sebesar 4,19 ($X_{2.10}$) yang artinya item mereka memiliki energi yang besar/memiliki bakat yang besar untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua adalah baik.

Sementara item mereka memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan diri dalam menyelesaikan implementasi SAP berbasis akrua ($X_{2.11}$) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 61,5% ($X_{2.11}$) dengan rata-rata item sebesar 4,31 ($X_{2.11}$) yang artinya item mereka memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan diri dalam menyelesaikan implementasi SAP berbasis akrua adalah sangat baik.

Untuk item mereka memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan implementasi SAP berbasis akrua walaupun usia saya diatas 40 tahun ($X_{2.12}$) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 57,3% ($X_{2.12}$) dengan rata-rata item sebesar 4,20 ($X_{2.12}$) yang artinya item mereka memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan implementasi SAP berbasis akrua walaupun usia saya diatas 40 tahun adalah baik.

Dari 12 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas sumber daya manusia dimana item mereka telah menyelesaikan tingkat pendidikan: pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk melakukan tugas-tugas dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrua ($X_{2.5}$) dan item mereka memiliki pengetahuan tentang tupoksi dan uraian tugas di bidang

keuangan dalam implementasi SAP berbasis akrual ($X_{2.6}$) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,32. Sedangkan item mereka memiliki keterampilan menggunakan aplikasi SIPKD dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual ($X_{2.4}$) merupakan item dengan nilai rata-rata yang terendah sebesar 4,00.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas sumber daya manusia dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item kualitas sumber daya manusia (X_2) sebesar 4,20. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa kualitas sumber daya manusia pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori baik.

4.2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)

Ada 11 pernyataan di dalam kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3). Adapun tanggapan responden terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden terhadap Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
$X_{3.1}$	-	-	1,0%	71,9%	27,1%	100%	4,26	Sangat Baik
$X_{3.2}$	-	1,0%	6,3%	72,9%	19,8%	100%	4,11	Baik
$X_{3.3}$	-	-	2,1%	58,3%	39,6%	100%	4,37	Sangat Baik
$X_{3.4}$	-	1,0%	14,6%	68,8%	15,6%	100%	3,99	Baik
$X_{3.5}$	-	-	4,2%	74,0%	21,9%	100%	4,18	Baik
$X_{3.6}$	3,1%	7,3%	19,8%	60,4%	9,4%	100%	3,66	Baik
$X_{3.7}$	4,2%	-	-	60,4%	35,4%	100%	4,23	Sangat Baik
$X_{3.8}$	2,1%	5,2%	17,7%	64,6%	10,4%	100%	3,76	Baik
$X_{3.9}$	2,1%	3,1%	12,5%	72,9%	9,4%	100%	3,84	Baik

X _{3.10}	2,1%	0,0%	15,6%	72,9%	9,4%	100%	3,88	Baik
X _{3.11}	-	-	7,3%	68,8%	24,0%	100%	4,17	Baik
Rata-rata variabel	4,04							Baik

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan informasi keuangan daerah terdiri dari 3 indikator dan 11 item pertanyaan. Untuk item proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan dan pelaporan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi menggunakan aplikasi SIPKD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (X_{3.1}) sebagian responden menjawab setuju 71,9% (X_{3.1}) dengan rata-rata per item 4,26 yang artinya item proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan dan pelaporan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi menggunakan aplikasi SIPKD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sangat baik.

Dan item di tempat saya bekerja sudah tersedia pendukung (*hardware*) seperti peralatan komputer dan server yang memadai sehingga sangat mendukung mereka dalam bekerja khususnya dalam implementasi SAP berbasis akrual pada OPD tersebut (X_{3.2}) sebagian responden menjawab setuju 72,9% (X_{3.2}) dengan rata-rata per item 4,11 (X_{3.2}) artinya item di tempat saya bekerja sudah tersedia pendukung (*hardware*) seperti peralatan komputer dan server yang memadai sehingga sangat mendukung mereka dalam bekerja khususnya dalam implementasi SAP berbasis akrual pada OPD tersebut adalah baik.

Untuk item *hardware* sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada OPD ini (X_{3.3}) sebagian responden menjawab setuju 58,3% (X_{3.3}) dengan rata-rata per item 4,37 yang

artinya item *hardware* sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada OPD adalah sangat baik.

Dan item di tempat mereka bekerja sudah tersedia dukungan anggaran yang memadai khususnya dalam membiayai implementasi SAP berbasis akrual menggunakan aplikasi SIPKD ($X_{3.4}$) sebagian responden menjawab setuju 68,8% ($X_{3.4}$) dengan rata-rata per item 3,99 ($X_{3.4}$) artinya item di tempat mereka bekerja sudah tersedia dukungan anggaran yang memadai khususnya dalam membiayai implementasi SAP berbasis akrual menggunakan aplikasi SIPKD adalah baik.

Dan item kelengkapan pendukung (*software*)/aplikasi SIPKD sudah sepenuhnya tersedia secara memadai untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi SAP berbasis akrual pada OPD ini ($X_{3.5}$) dan item pemerintah didukung oleh sistem dalam perangkat lunak SAP yaitu aplikasi SIPKD yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali ($X_{3.6}$) sebagian responden menjawab setuju 74,0% ($X_{3.5}$) dan 60,4% ($X_{3.6}$).

Rata-rata per item yaitu 4,18 ($X_{3.5}$) dan 3,66 ($X_{3.6}$) artinya item kelengkapan pendukung (*software*)/aplikasi SIPKD sudah sepenuhnya tersedia secara memadai untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi SAP berbasis akrual pada OPD ini dan item pemerintah didukung oleh sistem dalam perangkat lunak SAP yaitu aplikasi SIPKD yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali adalah baik.

Untuk item *software* sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada OPD ($X_{3.7}$) sebagian responden menjawab setuju 60,4% ($X_{3.7}$) dengan rata-rata per item 4,23 yang artinya item *software* sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada OPD adalah sangat baik.

Dan item di tempat mereka bekerja sudah tersedia jaringan internet & wifi beserta jaringan telekomunikasi pendukung lainnya yang memadai guna

mendukung implementasi SAP berbasis akrual ($X_{3.8}$) dan item di tempat saya bekerja sudah tersedia Energi listrik dari PLN dan alternatif kelistrikan yang lain untuk menunjang implementasi SAP berbasis akrual seperti genset ($X_{3.9}$) sebagian responden menjawab setuju 64,6% ($X_{3.8}$) dan 72,9% ($X_{3.9}$).

Rata-rata per item yaitu 3,76 ($X_{3.8}$) dan 3,84 ($X_{3.9}$) artinya item di tempat mereka bekerja sudah tersedia jaringan internet & wifi beserta jaringan telekomunikasi pendukung lainnya yang memadai guna mendukung implementasi SAP berbasis akrual dan item di tempat saya bekerja sudah tersedia Energi listrik dari PLN dan alternatif kelistrikan yang lain untuk menunjang implementasi SAP berbasis akrual seperti genset adalah baik.

Sementara untuk item di tempat mereka bekerja sudah tersedia jaringan telekomunikasi yang memadai guna implementasi SAP berbasis akrual ($X_{3.10}$) dan item jaringan sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada OPD ($X_{3.11}$) sebagian responden menjawab setuju 72,9% ($X_{3.10}$) dan 68,8% ($X_{3.11}$).

Rata-rata per item yaitu 3,88 ($X_{3.10}$) dan 4,17 ($X_{3.11}$) artinya item di tempat mereka bekerja sudah tersedia jaringan telekomunikasi yang memadai guna implementasi SAP berbasis akrual dan item jaringan sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada OPD adalah baik.

Dari 11 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi dimana item *hardware* sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada OPD ini ($X_{3.3}$) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,37. Sedangkan item pemerintah didukung oleh sistem dalam perangkat lunak SAP yaitu aplikasi SIPKD yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang

berulang kali ($X_{3.6}$) merupakan item dengan nilai rata-rata yang terendah sebesar 3,66.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item pemanfaatan teknologi informasi (X_3) sebesar 4,04. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori baik.

4.2.2 Hasil Pengujian Kualitas Data

4.2.2.1 Hasil Uji Validitas

Menurut Ghazali (2018:51), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dan suatu kuisiioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisiioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisiioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dengan α 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2018:51).

Pengujian validitas dilakukan dengan kriteria jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 96 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pernyataan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5% $df = n - 2 = 96 - 2 = 94$ dan $r_{tabel} = 0,201$

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian validitas untuk masing-masing variabel dapat ditunjukkan sebagai berikut :

a. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI (Y)

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Validitas Variabel Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI (Y)

	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI (Y)	Y_1	0,484	0,201	VALID
	Y_2	0,429	0,201	VALID
	Y_3	0,421	0,201	VALID
	Y_4	0,543	0,201	VALID
	Y_5	0,546	0,201	VALID
	Y_6	0,551	0,201	VALID
	Y_7	0,641	0,201	VALID
	Y_8	0,579	0,201	VALID
	Y_9	0,668	0,201	VALID
	Y_{10}	0,594	0,201	VALID
	Y_{11}	0,581	0,201	VALID
	Y_{12}	0,712	0,201	VALID
	Y_{13}	0,644	0,201	VALID

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 terdapat perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} variabel implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dimana $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 13 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.

b. Komitmen Organisasi (X_1)

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Validitas Variabel Komitmen Organisasi (X_1)

	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Komitmen Organisasi (X_1)	$X_{1.1}$	0,452	0,201	VALID
	$X_{1.2}$	0,531	0,201	VALID
	$X_{1.3}$	0,378	0,201	VALID
	$X_{1.4}$	0,458	0,201	VALID
	$X_{1.5}$	0,519	0,201	VALID
	$X_{1.6}$	0,555	0,201	VALID
	$X_{1.7}$	0,528	0,201	VALID
	$X_{1.8}$	0,549	0,201	VALID
	$X_{1.9}$	0,623	0,201	VALID

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Pada tabel 4.13 terdapat perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} variabel komitmen organisasi dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 9 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2)

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2)

	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kualitas Sumber	$X_{2.1}$	0,550	0,201	VALID
	$X_{2.2}$	0,327	0,201	VALID

Daya Manusia (X ₂)	X _{2.3}	0,659	0,201	VALID
	X _{2.4}	0,705	0,201	VALID
	X _{2.5}	0,691	0,201	VALID
	X _{2.6}	0,749	0,201	VALID
	X _{2.7}	0,717	0,201	VALID
	X _{2.8}	0,588	0,201	VALID
	X _{2.9}	0,546	0,201	VALID
	X _{2.10}	0,723	0,201	VALID
	X _{2.11}	0,514	0,201	VALID
	X _{2.12}	0,595	0,201	VALID

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Dan pada tabel 4.14 terdapat perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} variabel kualitas sumber daya manusia dimana $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 12 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃)

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃)

	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	X _{3.1}	0,242	0,201	VALID
	X _{3.2}	0,371	0,201	VALID
	X _{3.3}	0,302	0,201	VALID

Lanjutan Tabel 4.15

	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	X _{3.4}	0,615	0,201	VALID
	X _{3.5}	0,576	0,201	VALID
	X _{3.6}	0,822	0,201	VALID
	X _{3.7}	0,657	0,201	VALID
	X _{3.8}	0,784	0,201	VALID

	$X_{3.9}$	0,759	0,201	VALID
	$X_{3.10}$	0,870	0,201	VALID
	$X_{3.11}$	0,642	0,201	VALID

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.15 terdapat perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} variabel pemanfaatan teknologi informasi dimana $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 11 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11.

4.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Jakaria (2015:101), reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengujian dilakukan dengan SPSS versi 25 menggunakan teknik *cronbach alpha* dengan kriteria jika nilai *cronbach alpha* > 0,60 maka dinyatakan reliabel sedangkan jika nilai *cronbach alpha* < 0,60 maka dinyatakan reliabel (Sujarweni, 2014:192). Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil pengujian tersebut adalah :

Tabel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cutt Off	Ket.	N of Items	Kesimpulan
Implementansi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Y)	0,826	0,60	0,826 > 0,60	13	Reliabel
Komitmen Organisasi (X ₁)	0,644	0,60	0,644 > 0,60	9	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₂)	0,852	0,60	0,852 > 0,60	12	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	0,841	0,60	0,841 > 0,60	11	Reliabel

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen Implementansi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi menunjukkan *cronbach alpha* yaitu 0,826 , 0,644 , 0,852 , dan 0,841. Dari ke empat variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa empat variabel dalam penelitian ini adalah reliabel atau layak sebagai alat dalam pengumpulan data.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

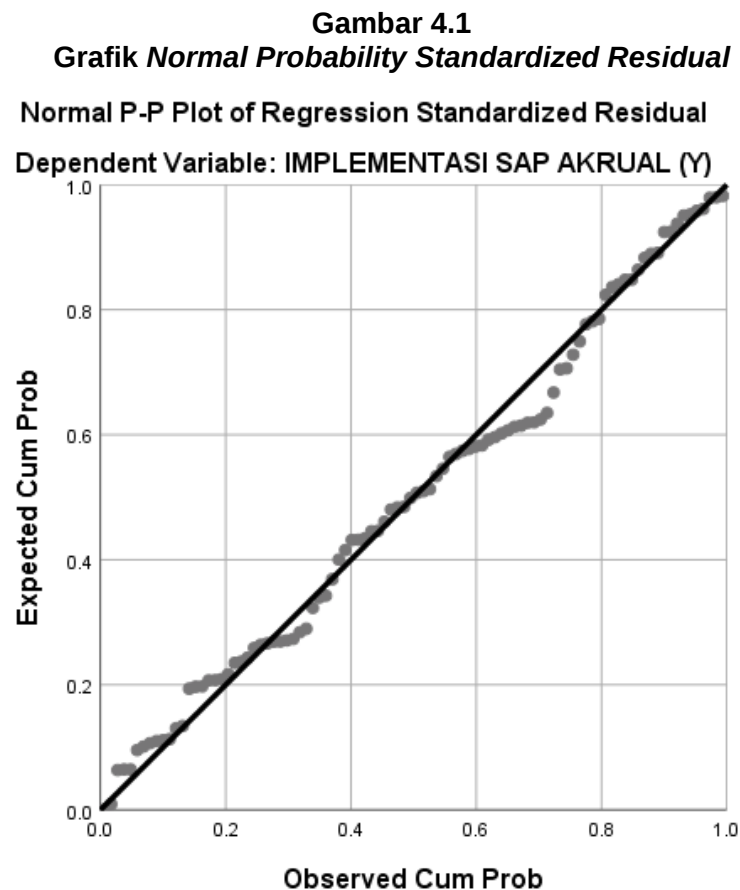
4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas

Menurut Jakaria (2015:157), normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel kekeliruan model berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah Grafik Normal P-P Plot dengan bantuan SPSS versi 25. Menurut Jakaria (2015:158), pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu

diagonal dari grafik normal. Menurut Jakaria (2015:158), dasar pengambilan keputusan Grafik Normal P-P Plot adalah :

3. Jika data menyebar di garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
4. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal (tidak terpencar dari garis diagonal) dan mengikuti arah garis diagonalnya maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:107), uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dimana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian dilakukan secara statistik dengan bantuan SPSS versi 25.

Menurut Ghozali (2018:107), multikoliniearitas dapat diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, dapat dilihat dari tolerance value dan nilai variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Jika nilai tolerance kurang dari atau sama dengan 0,10 ($\leq 0,10$) atau sama dengan nilai VIF lebih dari atau sama dengan 10 (≥ 10) maka terjadi gejala multikolinearitas sedangkan jika nilai tolerance lebih dari atau sama dengan 0,10 ($\geq 0,10$) atau nilai VIF kurang dari atau sama dengan 10 (≤ 10) maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikoliniearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2018:108). Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Hasil Uji Multikoliniearitas

Variabel	Tolerance	Kriteria	VIF	Kriteria	Kesimpulan
Komitmen Organisasi	0,753	$> 0,10$	1,327	< 10	Tidak Terjadi Multikoliniearitas

Lanjutan Tabel 4.17

Variabel	Tolerance	Kriteria	VIF	Kriteria	Kesimpulan
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,649	$> 0,10$	1,542	< 10	Tidak Terjadi Multikoliniearitas

Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,661	> 0,10	1,512	< 10	Tidak Terjadi Multikolinieritas
---------------------------------	-------	--------	-------	------	---------------------------------

Sumber : Data Primer Olahan, 2020.

Dari tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance semua variabel bebas (independen) > 0,10 (lebih dari 0,10) dan nilai variance inflation factor (VIF) < 10 (kurang dari 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolonearitas antara variabel bebas (independen) dalam model regresi.

4.2.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

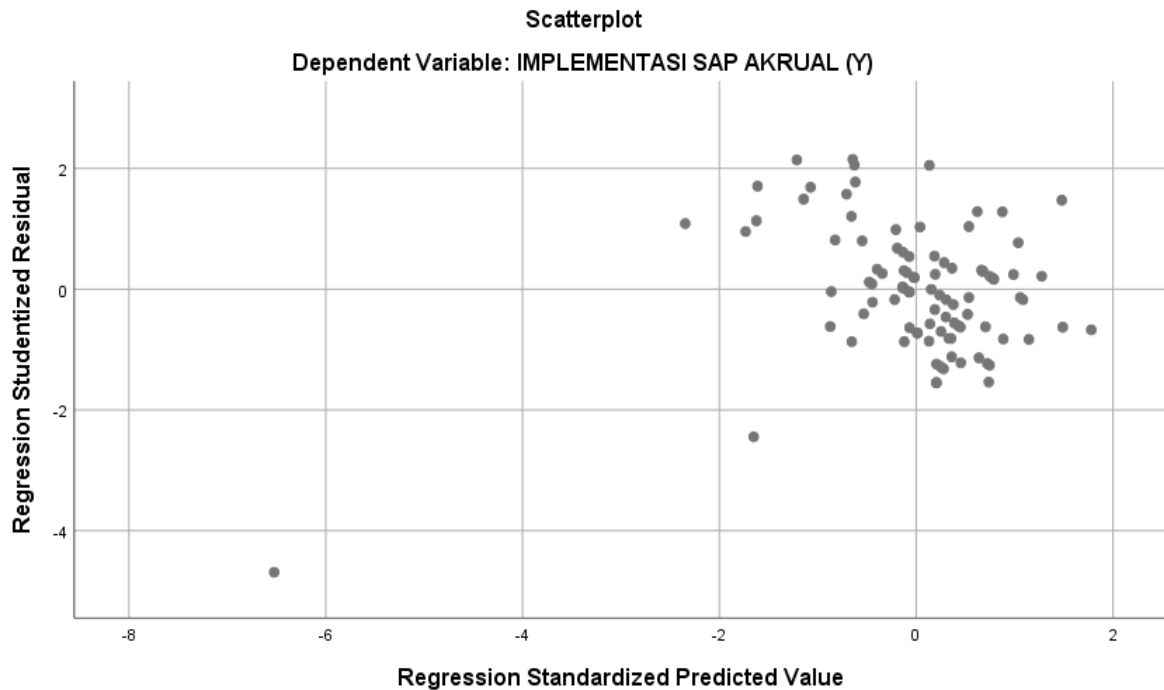
Menurut Ghozali (2018:137), Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dimana jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dengan demikian, Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot yang diperoleh dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Menurut Ghozali (2018:138), dasar pengambilan keputusan grafik scatterplot yaitu :

- c. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- d. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat ditunjukkan seperti gambar berikut :

Gambar 4.2
Grafik Scatterplot



Sumber : Data Primer Olahan, 2020.

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik pernyataan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak memperlihatkan pola tertentu pada scatterplot, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi dalam penelitian ini sudah baik, sehingga model regresi layak untuk memprediksi dependen berdasarkan masukan variabel independen yang digunakan.

4.2.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018:111), autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dalam model regresi diharapkan tidak terjadi problem autokorelasi. Pengujian

autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Durbin Watson yang diperoleh dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan uji Durbin Watson (DW) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika angka DW dibawah -2 berarti autokorelasi positif.
- b. Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi positif.
- c. Jika angka DW diatas +2, berarti ada autokorelasi positif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat ditunjukkan seperti tabel berikut :

Tabel 4.18
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson	Keterangan	Kesimpulan
Komitmen Organisasi (X ₁)	1,881	Nilai Durbin Watson (DW) 1,881 berkisar antara -2 sampai dengan +2	Tidak Ada Autokorelasi
Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₂)			Tidak Ada Autokorelasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)			Tidak Ada Autokorelasi

Sumber : Data Primer Olahan, 2020.

Dari tabel 4.18 diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,881 yaitu berkisar antara -2 sampai dengan +2. Hal ini membuktikan bahwa model regresi memenuhi syarat bebas autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.

4.2.4 Hasil Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel

dependen). Dalam analisis regresi linear berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. *Statistical Package For Sosial Science* (SPSS) versi 25 akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, menggunakan model analisis regresi berganda yaitu menggunakan variabel implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual
- a = Konstanta
- $\beta_{(1,2,3)}$ = Koefisien regresi masing-masing X
- X_1 = Variabel independen 1 (Komitmen Organisasi)
- X_2 = Variabel independen 2 (Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM))
- X_3 = Variabel independen 3 (Pemanfaatan Teknologi Informasi)
- e = Kesalahan Pengganggu (*disturbance's error*)

Dari pengolahan data komputer program SPSS versi 25, maka persamaan regresi berganda akan terlihat sebagai berikut :

Tabel 4.19
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,709	4,276		1,569	,120
KOMITMEN ORGANISASI (X_1)	,566	,102	,443	5,564	,000
KUALITAS SDM (X_2)	,239	,090	,228	2,653	,009

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X ₃)	,290	,097	,253	2,982	,004
--	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Implementasi SAP Akruai

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat disusun persamaan regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar akuntansi berbasis akrual yaitu sebagai berikut :

$$Y = 6,709 + 0,566 X_1 + 0,239 X_2 + 0,290 X_3 + e$$

a = 6,709 adalah konstanta yang artinya apabila variabel komitmen organisasi (X₁), kualitas sumber daya manusia (X₂) dan pemanfaatan teknologi informasi (X₃) sama dengan 0, maka variabel implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) sebesar 6,709.

β_1 = 0,566 adalah koefisien variabel (X₁) yang artinya jika variabel komitmen organisasi (X₁) naik sebesar satu satuan, maka variabel implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,566 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

β_2 = 0,239 adalah koefisien variabel (X₂) yang artinya jika variabel kualitas sumber daya manusia (X₂) naik sebesar satu satuan, maka variabel implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,239 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

β_3 = 0,290 adalah koefisien variabel (X₃) yang artinya jika variabel pemanfaatan teknologi informasi (X₃) naik sebesar satu satuan, maka variabel implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,290 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

e = variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas standar error
(e) mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y
tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

4.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.5.1 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018:98), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka analisis dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output aplikasi SPSS versi 25. Menurut Ghozali (2018:99) dasar pengambilan keputusan uji t adalah :

- 3) Signifikan bila p value/nilai signifikan $< \alpha$ (0,05), sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak (ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen)
- 4) Tidak signifikan bila p value/ nilai signifikan $> \alpha$ (0,05), sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima (tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen)

Tabel 4.20
Rangkuman Uji Statistik t

Hipotesis	t_{hitung} & tabel	Sig.	Kesimpulan
Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (H_1)	5,564 > 1,986	0,000 < 0,05	H_1 diterima

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (H ₂)	2,653 > 1,986	0,009 < 0,05	H ₂ diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (H ₃)	2,982 > 1,986	0,004 < 0,05	H ₃ diterima

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Dari tabel 4.20 uji parsial diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Variabel Komitmen Organisasi

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel komitmen organisasi memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,564 > 1,986$) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima. Ini berarti komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi terbukti dengan tingkat pengaruh sebesar 0,566. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan komitmen organisasi maka standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan terimplementasikan dengan baik.

b. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel kualitas sumber daya

manusia memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,653 > 1,986$) dan tingkat signifikansi 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Ini berarti kualitas sumber daya manusia (SDM) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual terbukti dengan tingkat pengaruh sebesar 0,239. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada setiap OPD maka standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan terimplementasikan dengan baik.

c. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,982 > 1,986$) dan tingkat signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Ini berarti pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual terbukti dengan tingkat pengaruh sebesar 0,290. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal maka standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan terimplementasikan dengan baik.

4.2.5.2 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018:98), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka analisis dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output aplikasi SPSS versi 25. Menurut Ghozali (2018:98) dasar pengambilan keputusan uji F adalah :

- 3) Signifikan bila $p \text{ value/nilai signifikan} < \alpha (0,05)$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak (ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen)
- 4) Tidak signifikan bila $p \text{ value/ nilai signifikan} > \alpha (0,05)$, sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima (tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen)

Tabel 4.21
Rangkuman Uji Statistik F

Hipotesis	$F_{\text{hitung \& tabel}}$	Sig.	Kesimpulan
Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (H_4)	$39,128 > 2,70$	$0,000 < 0,05$	H_4 diterima

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel 4.21 terlihat bahwa memiliki F_{hitung} lebih besar F_{tabel} ($39,128 > 2,70$) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima dan variabel

independen yaitu variabel komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Menurut Algifari (2013:260), nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen yang digunakan sebagai ukuran besarnya pengaruh (dalam persen) semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.22
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,749 ^a	,561	,546	3,434

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas SDM, Komitmen Organisasi

b. Dependent Variable: Implementasi SAP Akrual

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.22, hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,546 yang berarti bahwa variabel dependen (implementasi SAP berbasis akrual) mampu dijelaskan oleh variabel independen (komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi) sebesar 54,6% dan sisanya sebesar 45,4% dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang agak rendah antara variabel independen dengan variabel dependen karena nilai R^2 yang berada antara 0,400 sampai dengan 0,600.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil penelitian yang telah disajikan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen organisasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh komitmen organisasi dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial nilai sig. variabel komitmen organisasi adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen organisasi terhadap implementasi Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa ketika entitas pemerintah memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI akan terimplementasikan dengan baik.

Hasil analisis deskriptif pada variabel komitmen organisasi telah menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan sebesar 3,88. Dari rata-rata jawaban yang diberikan responden yang merupakan pegawai bagian keuangan di OPD Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju.

Hal di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki komitmen organisasi yang cukup tinggi. Komitmen organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi telah ditunjukkan melalui perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 serta selama 9 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai tahun 2019.

Hal tersebut membuktikan bahwa pegawai bagian keuangan telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab dan profesional. Hal ini terkait dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang harus dijalankan, dimana setiap instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah sudah harus melakukan pengakuan dan pengukuran akuntansi dengan menggunakan sistem akuntansi yang berbasis akruaI.

Hal ini terjadi karena pegawai di bagian keuangan di Kabupaten Kuantan Singingi telah memiliki rasa tanggung jawab dan loyalitas terhadap organisasi. Sehingga berdampak kepada perilaku pegawai di bagian keuangan yang memiliki kepedulian, perasaan terikat, empati, terus termotivasi serta mampu memberdayakan dirinya sendiri. Selain itu pegawai bagian keuangan juga telah

memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kepedulian dan kerja keras setiap individu menghasilkan kesuksesan di dalam organisasi.

Hal tersebut terlihat dari 9 item pertanyaan/kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel komitmen organisasi dimana item mereka akan menerima setiap pekerjaan yang diberikan demi organisasi agar implementasi SAP berbasis akrual sukses ($X_{1.9}$) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,01.

Komitmen organisasi yang baik ini bisa dilihat dari pegawai bagian keuangan OPD Kabupaten Kuantan Singingi yang bekerja di bagian keuangan selama lebih dari 10 tahun atau sebesar 42,7%. Hal ini menandakan telah terjalin keterlibatan secara emosional terhadap organisasi. pegawai di bagian keuangan yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun ini telah menunjukkan bahwa pegawai di bagian keuangan memiliki komitmen berkelanjutan.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Sinambela (2019:173), dukungan manajemen puncak sangat penting, tetapi dukungan mereka saja tidaklah cukup dibutuhkan juga dukungan dan komitmen dari pimpinan menengah dan pimpinan tingkat bawah dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi. Menurut Sinambela (2019:168), apabila organisasi memiliki sumber manusia (SDM) yang profesional, berkualitas berkomitmen, dan berintegrasi yang baik dipastikan organisasi tersebut dapat berkembang dengan pesat.

Jika pemerintah daerah memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual maka Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual akan terimplementasi dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis yang pertama mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Erawatis,dkk (2018) dengan hasil yang diperoleh komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Oleh karena itu, jika pegawai keuangan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemerintah daerah maka akan berpengaruh terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada pemerintah daerah. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Fitrizal (2017) dan penelitian Yulianto (2018) diperoleh hasil penelitian yaitu komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

4.3.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil penelitian yang telah disajikan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial nilai sig. variabel kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi. Ini berarti apabila pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola keuangan maka Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua akan terimplementasikan dengan baik.

Hasil analisis deskriptif pada variabel kualitas sumber daya manusia telah menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan sebesar 4,20. Dari rata-rata jawaban yang diberikan responden yang merupakan pegawai bagian keuangan di OPD Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju.

Hal di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki sumber daya manusia yang cukup berkualitas dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kuantan Singingi telah ditunjukkan melalui perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 serta selama 9 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai tahun 2019.

Hal tersebut membuktikan bahwa pegawai bagian keuangan telah berkompeten dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010. Meskipun demikian, pegawai bagian keuangan di Kabupaten Kuantan Singingi masih perlu meningkatkan lagi kompetensinya. Pegawai bagian keuangan harus meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus karena implementasi SAP berbasis akrual ini akan terus berkembang, sehingga kompetensi yang semakin baik sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan dari implementasi SAP berbasis akrual.

Hal tersebut juga terlihat dari 12 item pertanyaan yang digunakan untuk

mengukur variabel kualitas sumber daya manusia dimana item mereka telah menyelesaikan tingkat pendidikan: pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk melakukan tugas-tugas dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual ($X_{2.5}$) dan item mereka memiliki pengetahuan tentang tupoksi dan uraian tugas di bidang keuangan dalam implementasi SAP berbasis akrual ($X_{2.6}$) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,32.

Hasil penelitian ini mendukung teori Sinambela (2019:3), Sumber daya manusia dalam setiap organisasi baik publik maupun bisnis, adalah sumber daya yang utama, di samping berbagai sumber daya lainnya. Hal itu diakibatkan manusia menjadi pelaku utama yang akan menggerakkan berbagai sumber daya yang dimaksud. Oleh sebab itu, dalam mengelola sumber daya tersebut, SDM-nya haruslah berkualitas. Dengan kata lain, berbagai sumber daya yang melimpah ruah jika tidak diikuti dengan kompetensi SDM akan menjadi percuma karena tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Sinambela (2019:3), jumlah modal yang besar ketika tidak dapat dikelola manusia dengan baik, akan menjadi modal yang mati tidak akan bertambah, bahkan kemungkinan yang terjadi akan sebaliknya, yakni akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan SDM yang berkualitas dalam mengelola keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis yang kedua mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) dengan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrual. Oleh karena itu, jika pegawai keuangan pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan berpengaruh terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Yulianto (2018) yang diperoleh hasil penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

4.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil penelitian yang telah disajikan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial nilai sig. variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ini berarti jika pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal maka Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual akan terimplementasikan dengan baik.

Hasil analisis deskriptif pada variabel pemanfaatan teknologi informasi telah menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan sebesar 4,04. Dari rata-rata jawaban yang diberikan

responden yang merupakan pegawai bagian keuangan di OPD Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju.

Hal di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Pemanfaatan Teknologi informasi di Kabupaten Kuantan Singingi telah ditunjukkan telah tersedianya *hardware*, *software* dan jaringan di bagian keuangan setiap OPD yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana ketersediaan *hardware*, *software* dan jaringan merupakan landasan untuk menjalankan implementasi SAP berbasis akrual yang dituntut untuk menggunakan aplikasi dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual sejak tahun 2017. Hal ini diperkuat dengan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 serta selama 9 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai tahun 2019.

Hal tersebut juga terlihat dari 11 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi dimana item *hardware* sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada OPD ini ($X_{3,3}$) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,37.

Hasil penelitian ini mendukung teori secara umum suatu teknologi informasi dapat memberikan banyak manfaat dalam membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya antara lain transaksi yang diproses dengan cepat, penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, data yang dapat disimpan dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2010:85).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pengelolaan sistem informasi ini didukung dengan jaringan koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, aplikasi SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis yang ketiga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Erawatis,dkk (2018) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Fitriзал (2017) dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu sistem informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

4.3.4 Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara simultan nilai sig. adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tingginya komitmen organisasi pemerintah daerah, sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal maka Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI akan terimplementasikan dengan baik.

Pegawai bagian keuangan di Kabupaten Kuantan Singingi telah menerapkan komitmen organisasi, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan implementasi SAP

berbasis akrual yang baik. Hal tersebut ditunjukkan melalui perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 serta selama 9 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai tahun 2019.

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah sangat ditentukan oleh peran OPD dan juga pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada setiap OPD tersebut. Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual seperti: komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi telah dilaksanakan dengan baik, maka hal ini dapat mendorong implementasi SAP berbasis akrualnya menjadi semakin baik.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang terdapat dalam Sinambela (2019:168), apabila organisasi memiliki sumber manusia (SDM) yang professional, berkualitas, berkomitmen, dan berintegritas yang baik dipastikan organisasi tersebut dapat berkembang dengan pesat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu organisasi termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) sangat membutuhkan komitmen organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah.

Menurut Sinambela (2019:419), sumber daya manusia memiliki peran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Tidak ada proses organisasi tanpa sumber daya manusia. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, tersedianya modal dan sumber daya lainnya, tanpa sumber daya manusia yang memadai, sangat mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Sumber daya manusia yang dimaksud tentu saja adalah SDM yang berkualitas. Selain SDM yang berkualitas, pemerintah juga membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah. Dukungan manajemen puncak sangat penting, tetapi dukungan mereka saja tidaklah cukup dibutuhkan juga dukungan dan komitmen dari pimpinan menengah dan pimpinan tingkat bawah (Sinambela, 2019:172).

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis yang keempat mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Armaini (2017) membuktikan secara empiris bahwa sumber daya manusia dan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dalam penelitian Fitrizal (2017) diperoleh hasil penelitian yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sedangkan sistem informasi dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan besarnya pengaruh 0,566.
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan besarnya pengaruh 0,239.
3. Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan besarnya pengaruh 0,290.
4. Komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan besarnya pengaruh 0,546.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI secara optimal dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah diraih Kabupaten Kuantan Singingi selama beberapa tahun ini.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pegawai-pegawai yang terlibat dalam proses implementasi SAP berbasis akrual. Baik pegawai yang terlibat dalam implementasi SAP berbasis akrual maupun pegawai pengembangan konsep dan regulasi, dengan memberikan pelatihan-pelatihan SAP berbasis akrual secara intensif dan berkala.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat mengoptimalkan jaringan internet maupun wifi yang telah tersedia dengan cara selalu memperbaiki komponen teknologi informasi secara berkala agar implementasi SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan lancar.
4. Penelitian ini hanya meninjau implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dari aspek komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi saja, untuk penelitian selanjutnya dapat pula ditambahkan atau diganti variabel lainnya yang mampu membuktikan praktik implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algifari. 2013. *Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erlina, Rambe, Omar Sakti dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Edisi Pertama. Jakarta: Selemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: PT Grasindo
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BEFP.
- Jakaria, Yaya. 2015. *Mengolah Data Penelitian Kuantitatif dengan SPSS*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maryono dan Istiana, Patmi. 2009. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yudhistira.
- Nawawi, Hadari. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasojo, Lantip Diat dan Riyanto. 2011. *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ratmono, Dwi dan Sholihin, Mahfud. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Sarwono, Jonathan. 2015. *Rumus-rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi. Edisi Pertama*. Yogyakarta: ANDI.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana. 2009. *Metode Statistik*. Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suhandi. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah: berbasis Akrua untuk SKPD*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Pengantar Statistik. Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, Ria Mardiana dan Syarif, Darman. 2018. *Komitmen Organisasi: Definisi, Dipengaruhi dan Mempengaruhi*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Empat*. John Wiley and Sons. Inc.
- Wahana Komputer. 2010. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta: ANDI.

Skripsi

- Arif, Rochman. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Kabupaten Lamongan. Skripsi. Universitas Wijaya Kusuma.
- Fitrizal, Rian. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Madjid, Fadilah. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Studi empiris Pemerintah Daerah Kabupaten Maros). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Oktavianti, Lidya. 2017. Pengaruh Komitmen Organisasi Kompetensi dan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Implementasi Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Bengkulu Tengah. Skripsi. Universitas Bengkulu.

Pratiwi, Laras Kusuma. 2018. Pengaruh kompetensi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan insentif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dengan motivasi sebagai variabel pemoderasi. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal

Iznillah, M Luthfi. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). *Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015*. h. 1-15.

Karyogis, Kadek Nila dan Putra , I Made Pande Dwiana. 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua di Kabupaten Bangli. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.20.1 Juli 2017. ISSN: 2302-8556. h. 555-584.

Permana, Ida Bagus Gede dan Wiratmaja, I Dewa Nyoman. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.3. September 2016. ISSN 2302-8556.

Pratiwi, Annisa Intan. Rahayu, Sri, dan Zutilisna, Djusnimar. 2017. Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*. Vol.9 No.1 April. ISSN 2597-6826. h. 7-11

Sari, Nia Permata. 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kesuksesan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* . h. 1-15

Wulandari, Tri. Hidayati, Nur dan Mawardi, M Cholid. 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Inter Terhadap Keberhasilan SAP Berbasis Akrua Di OPD Kabupaten Malang. *Jurnal akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas malang*. E-JRA Vol.07 No.04 agustus. h. 74-81.

Yulianto, Andika. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris pada Badan Pengelola

Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*. h.1-11

Armaini, Rosy. 2017. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi ACSY Politehnik Sekayu*. Vol. VI, No 2, Juli-Desember. ISSN : 2407-2184. h. 71-85.

Erawatis, Teguh dan Kurniawan, Danang. 2018. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajian dari aspek keperilakuan (Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 21. No.2 oktober. h. 314-331.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

LAMPIRAN KUISIONER

IDENTITAS RESPONDEN

Nomor Responden :(diisi oleh peneliti)

Nama Responden :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Umur : ☐ 26 - 30 Tahun
☐ 31 - 35 Tahun
☐ 36 - 40 Tahun
☐ 41 - 45 Tahun
☐ 46 - 50 Tahun
☐ > 51 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA ☐ D3 ☐
S1 ☐ S2 ☐

Jabatan : ☐ Kasubbag Keuangan
☐ Bendahara Penerimaan
☐ Bendahara Pengeluaran
☐ Petugas Asset

Masa Kerja

di Bagian Keuangan : <5 Tahun ☐ 5-10 Tahun ☐ >10 Tahun

Nama OPD :

Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti:

1.....

2.....

3.....

PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda *Check List* (✓) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi di tempat Bapak/Ibu/Sdr/Sdri bekerja.

Keterangan :

Sangat Tidak Setuju : STS

Tidak Setuju : TS

Kurang Setuju : KS

Setuju : S

Sangat Setuju : SS

DAFTAR PERNYATAAN

I. IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

AKRUAL		Alternatif Jawaban				
No	Implementasi SAP Berbasis Akrua	STS	TS	KS	S	SS
Pengakuan Pendapatan						
1	Saya telah mengakui pendapatan LO pada saat hak atas pendapatan sudah ada walaupun kas belum diterima					
2	Saya selalu mencatat penerbitan surat ketetapan pajak sebagai pendapatan LO meskipun wajib pajak belum menyetor					
3	Saya selalu mencatat transaksi pajak tahun 2018 yang diterima tahun 2019 dengan mendebet akun pendapatan-LO dan mengkredit akun piutang pendapatan					
4.	Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.					
5	Saya dapat membedakan antara pendapatan-LO dan pendapatan LRA					
Pengakuan Beban						
6	Saya selalu mengakui transaksi beban pada saat timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai meskipun kas belum keluar					
7	Setiap transaksi pembelian ATK akan saya catat dalam akun kas yang dikredit setiap ada transaksi beban					
8	Setiap pemakaian ATK selalu dicatat sebagai beban ATK					
9	Saya dapat membedakan antara beban dan belanja					

Lanjutan Tabel

Laporan Operasional						
10	Saya menyajikan laporan operasional sesuai SAP berbasis Akrual					

11	Saya selalu menyajikan Laporan Operasional berdasarkan sumber data yang diperlukan					
12	Saya selalu mengklasifikasikan pendapatan operasional dan pendapatan non operasional sesuai format Laporan Operasional					
13	Selisih lebih harga jual aset tetap dengan nilai buku diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional					

Sumber : Oktavianty (2017) dan Arif (2018).

II. KOMITMEN ORGANISASI

No	Komitmen Organisasi	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Komitmen Afektif						
1	Saya merasa senang dalam menjalani karier di organisasi khususnya dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual					
2	Saya merasa bahwa masalah di organisasi adalah masalah saya juga. Terutama masalah yang berkaitan dengan implementasi SAP berbasis akrual					
3	Organisasi ini sangat berarti bagi saya					
Komitmen Berkelanjutan						
4	Saya merasa tidak memiliki alternatif pekerjaan lain untuk dapat meninggalkan organisasi ini.					
5	Saya merasa rugi jika sekarang saya berhenti bekerja dari organisasi ini					
6	Hidup saya akan kacau secara materi jika sekarang saya keluar dari organisasi ini.					
Komitmen Normatif						
7	Saya merasa bahwa kesuksesan organisasi memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya khususnya dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual					
8	Saya sangat peduli dan bersedia bekerja keras dalam menyelesaikan tugas-tugas					

Lanjutan Tabel

No	Komitmen Organisasi	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
	dan tanggung jawab khususnya dalam menyukseskan implementasi SAP berbasis akrual					

9	Saya akan menerima setiap pekerjaan yang diberikan demi organisasi agar implementasi SAP berbasis akrual sukses					
---	---	--	--	--	--	--

Sumber : Oktavianty (2017) dan Madjid (2016).

III. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Keterampilan						
1	Saya memiliki keterampilan fisik yang bisa digunakan dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual					
2	Saya memiliki keterampilan akademik yang bisa digunakan dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual					
3	Saya memiliki keterampilan menggunakan komputer dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual					
4	Saya memiliki keterampilan menggunakan aplikasi SIPKD dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual					
Pengetahuan						
5	Saya telah menyelesaikan tingkat pendidikan: pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk melakukan tugas-tugas dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual.					
6	Saya memiliki pengetahuan tentang tupoksi dan uraian tugas di bidang keuangan dalam implementasi SAP berbasis akrual					
7	Saya memiliki pengetahuan tentang pengakuan dan transaksi keuangan dalam menyelesaikan implementasi SAP berbasis akrual					
8	Saya memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan					

Lanjutan Tabel

No	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
	dengan keuangan daerah dalam menyelesaikan implementasi SAP berbasis akrual					
Kemampuan						

9	Saya memiliki kecerdasan (intelektual, emosional, spiritual, dan sosial) yang selalu saya gunakan untuk bekerja dalam menyelesaikan implementasi SAP berbasis Akrua					
10	Saya memiliki energi yang besar/memiliki bakat yang besar untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua					
11	Saya memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan diri dalam menyelesaikan implementasi SAP berbasis akrua					
12	Saya memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan implementasi SAP berbasis akrua walaupun usia saya diatas 40 tahun					

Sumber : Oktavianty (2017) dan Madjid (2016).

IV. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

No	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Kelengkapan <i>Hardware</i>						
1	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan dan pelaporan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi menggunakan aplikasi SIPKD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
2	Di tempat saya bekerja sudah tersedia pendukung (<i>hardware</i>) seperti peralatan komputer dan server yang memadai sehingga sangat mendukung saya dalam bekerja khususnya dalam implementasi SAP berbasis akrual pada OPD ini.					

Lanjutan Tabel

No	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
3	<i>Hardware</i> sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrua pada OPD ini.					
4	Di tempat saya bekerja sudah tersedia dukungan anggaran yang memadai khususnya dalam membiayai					

	implementasi SAP berbasis akrual menggunakan aplikasi SIPKD					
Kelengkapan Software						
5	Kelengkapan pendukung (<i>software</i>) /aplikasi SIPKD sudah sepenuhnya tersedia secara memadai untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi SAP berbasis akrual pada OPD ini.					
6	Pemerintah didukung oleh sistem dalam perangkat lunak SAP yaitu aplikasi SIPKD yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali					
7	<i>Software</i> sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada OPD ini.					
Kelengkapan Network						
8	Di tempat saya bekerja sudah tersedia jaringan internet & wifi beserta jaringan telekomunikasi pendukung lainnya yang memadai guna mendukung implementasi SAP berbasis akrual					
9	Di tempat saya bekerja sudah tersedia Energi listrik dari PLN dan alternatif kelistrikan yang lain untuk menunjang implementasi SAP berbasis akrual seperti genset.					
10	Di tempat saya bekerja sudah tersedia jaringan telekomunikasi yang memadai guna implementasi SAP berbasis akrual					
11	Jaringan sangat mempermudah dan membantu dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada OPD ini.					

Sumber : Oktavianty (2017) dan Pratiwi (2018).

Lampiran 2 : Tabulasi Data

NO	IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL (Y)													
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	JUMLAH
1	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	62
2	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	47
3	4	4	4	5	4	3	4	4	5	4	4	5	4	54
4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	4	54
5	4	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	59
6	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
7	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	50
8	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
9	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	58
10	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	47
11	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
13	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	54
14	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	58
15	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	46
16	4	3	3	4	4	4	4	3	4	5	4	5	4	51
17	3	3	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	48
18	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	3	5	5	54
19	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	50
20	3	4	4	5	4	3	1	4	1	3	3	1	1	37
21	3	4	3	3	4	5	4	4	4	3	4	4	4	49
22	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	5	4	55
23	3	3	4	4	3	5	3	4	5	5	4	4	4	51
24	4	4	4	5	4	3	4	4	5	4	4	5	4	54
25	4	5	4	5	4	5	4	5	4	3	5	5	5	58
26	4	4	3	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	56

Lanjutan Tabel

NO	IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL (Y)													
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	JUMLAH
27	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	56
28	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	57
29	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	53
30	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	5	4	3	51
31	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	53
32	4	4	5	3	4	4	5	3	4	3	4	4	4	51
33	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	52
34	4	3	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	48
35	3	4	3	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	55
36	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	3	53

37	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	56
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	51
39	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	4	4	5	55
40	5	5	5	3	4	5	4	4	4	4	3	5	4	55
41	4	4	3	4	4	5	3	3	4	4	3	4	5	50
42	4	4	4	5	4	4	5	4	3	5	4	5	4	55
43	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	52
44	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	51
45	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	56
46	4	5	3	4	4	4	5	3	4	4	3	4	3	50
47	4	3	3	4	4	4	4	3	5	5	4	5	4	52
48	3	3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	48
49	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	52
50	4	4	5	4	5	5	4	5	3	4	4	4	4	55
51	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	48
52	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	52
53	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	5	4	49

Lanjutan Tabel

NO	IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL (Y)													JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	
54	2	3	4	2	3	5	3	5	4	5	5	4	5	50
55	4	3	3	4	5	5	4	4	5	4	4	3	3	51
56	4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	51
57	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	52
58	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	55
59	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	55
60	3	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	49
61	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	49
62	2	2	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	46
63	4	3	4	4	3	5	5	4	3	5	4	5	4	53
64	3	3	4	4	3	4	5	5	4	3	5	4	5	52
65	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	55
66	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	50
67	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
68	4	4	5	4	5	5	3	4	3	4	3	4	4	52
69	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	52
70	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	48
71	3	4	3	4	4	4	4	5	5	5	3	4	5	53
72	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	48
73	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	5	49
74	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	57
75	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4	51
76	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	51

77	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	51
78	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
79	3	4	3	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	49
80	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4	5	5	5	54

Lanjutan Tabel

NO	IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL (Y)													JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	
81	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
82	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	5	5	4	49
83	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	50
84	4	4	4	4	3	5	4	3	5	5	5	5	4	55
85	4	3	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	55
86	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	51
87	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	53
88	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	48
89	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	52
90	3	4	5	4	3	4	5	4	3	5	4	3	5	52
91	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	53
92	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
93	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	5	4	4	52
94	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	53
95	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	51
96	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	49

NO	KOMITMEN ORGANISASI (X ₁)									
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	JUMLAH
1	5	5	5	3	3	4	5	5	4	39
2	4	4	4	3	5	5	5	5	4	39
3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	37
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
6	4	4	4	3	3	3	4	4	3	32
7	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35

47	3	4	5	5	4	5	4	5	4	39
48	4	5	5	4	4	3	4	4	4	37
49	4	3	3	4	4	5	4	4	5	36
50	3	3	4	3	3	4	4	4	4	32
51	3	4	3	3	4	2	5	2	4	30
52	4	4	3	4	4	4	4	5	4	36
53	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
54	3	3	4	3	4	3	2	3	5	30

Lanjutan Tabel

NO	KOMITMEN ORGANISASI (X ₁)									JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	
55	3	4	4	5	4	4	5	3	4	36
56	4	4	4	2	3	4	4	4	3	32
57	4	2	5	3	4	4	3	5	5	35
58	3	4	4	5	5	5	4	5	5	40
59	5	4	3	5	5	3	4	4	4	37
60	2	3	4	4	3	4	4	4	5	33
61	3	4	4	3	5	4	5	5	5	38
62	4	4	3	5	2	3	4	4	4	33
63	3	4	4	2	3	4	4	5	4	33
64	5	4	4	5	4	2	3	4	4	35
65	2	3	4	4	5	5	5	5	4	37
66	3	4	5	3	4	4	5	4	4	36
67	4	5	4	4	3	4	4	4	5	37
68	3	4	4	4	3	3	5	4	3	33
69	4	5	5	2	4	2	4	5	4	35
70	5	3	4	4	4	3	4	4	3	34
71	5	4	4	3	2	4	3	5	4	34
72	4	4	5	4	4	4	2	4	3	34
73	4	5	4	4	3	3	4	2	3	32
74	5	4	3	5	2	3	4	5	4	35
75	4	5	4	5	3	4	3	4	3	35
76	4	4	4	5	4	5	3	4	4	37
77	4	3	5	5	3	2	4	3	4	33
78	5	4	4	4	2	4	4	3	3	33
79	4	4	4	4	5	4	5	3	4	37
80	4	5	3	4	4	4	4	3	5	36
81	5	2	4	4	3	2	5	4	4	33

Lanjutan Tabel

NO	KOMITMEN ORGANISASI (X ₁)									JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	
82	4	4	4	2	4	5	4	4	4	35

83	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
84	4	4	3	5	4	4	3	2	3	32
85	5	4	4	4	4	2	4	4	4	35
86	5	5	3	4	5	4	4	3	4	37
87	4	4	4	4	5	4	3	5	5	38
88	4	5	3	5	4	2	4	2	5	34
89	5	2	5	4	4	2	4	5	4	35
90	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
91	4	2	5	3	4	4	4	3	4	33
92	4	5	4	4	5	4	4	4	4	38
93	4	4	4	4	3	4	4	2	4	33
94	5	4	3	5	5	4	4	5	5	40
95	4	4	4	2	2	3	4	4	4	31
96	3	4	4	5	4	3	4	5	4	36

NO	KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (X ₂)												JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	
1	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	54
2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	53
5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	55
6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	46
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	58
10	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
11	2	4	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	30
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
13	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
14	5	4	5	4	3	4	5	3	2	2	4	3	44
15	3	2	4	3	3	3	2	3	3	2	4	4	36

16	4	5	4	4	5	4	3	5	5	4	4	3	50
17	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
18	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	5	4	43
19	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	52
20	3	5	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	40
21	4	4	3	3	3	4	4	4	5	4	4	3	45
22	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	52
23	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	51
24	3	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	51
25	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	53
26	3	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	49

Lanjutan Tabel

NO	KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (X ₂)												JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	
27	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	56
28	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	51
29	4	4	3	4	4	5	4	5	5	4	5	4	51
30	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	51
31	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	51
32	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	54
33	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	56
34	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	54
35	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	54
36	3	5	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	49
37	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	54
38	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	52
39	4	5	3	3	4	4	5	3	5	4	4	5	49
40	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3	4	4	46
41	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	55
42	3	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	48
43	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	50
44	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	52
45	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	58
46	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	53
47	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	53
48	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	50
49	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	51
50	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
51	2	3	3	3	4	4	3	3	2	5	4	5	41
52	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	52
53	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	54

Lanjutan Tabel

NO	KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (X ₂)												JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	
54	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	53
55	3	5	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	49
56	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	52
57	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	52
58	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	53
59	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	55
60	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	52
61	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	53
62	5	4	3	3	3	4	3	4	4	5	3	3	44
63	4	5	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	42
64	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	52
65	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	52
66	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	50
67	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	55
68	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	54
69	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	42
70	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	54
71	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
72	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	50
73	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	52
74	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	59
75	4	5	3	3	4	3	4	4	3	3	4	2	42
76	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	52
77	4	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	50
78	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	52
79	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	53
80	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	53

Lanjutan Tabel

NO	KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (X ₂)												JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	
81	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	52
82	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	51
83	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	54
84	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	50
85	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	53
86	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	51
87	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	51
88	4	5	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	43
89	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	41
90	5	4	4	4	5	4	5	3	4	4	5	5	52

91	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	50
92	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	54
93	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	54
94	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	56
95	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	5	3	43
96	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	52

NO	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X ₃)											JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	
1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	53
2	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	42
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
6	5	5	3	3	4	3	5	3	5	4	5	46
7	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	40
8	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	45
9	4	5	5	5	4	1	1	1	1	1	4	32
10	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	42
11	4	2	5	2	4	1	1	1	1	1	4	26
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
13	4	4	5	3	3	3	4	2	3	3	3	37
14	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	48
15	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	37
16	4	3	4	3	4	4	5	4	4	3	3	41
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
18	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
19	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
20	4	4	4	3	3	3	4	2	4	3	3	37
21	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43
22	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	46
23	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	44

24	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	45
25	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	48
26	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45

Lanjutan Tabel

NO	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X ₃)											JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	
27	4	5	5	5	4	2	1	3	2	4	4	39
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
29	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	41
30	5	4	4	4	4	3	4	2	3	3	4	40
31	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	44
32	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	47
33	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	47
34	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
35	4	4	5	4	5	3	4	2	3	3	4	41
36	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	48
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
38	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	46
39	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	44
40	5	4	4	3	4	4	5	3	4	3	4	43
41	5	5	4	5	4	1	1	4	3	3	4	39
42	5	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	43
43	5	4	4	4	4	2	4	3	4	4	5	43
44	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
45	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	53
46	5	5	4	4	5	3	4	2	4	4	4	44
47	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	5	46
48	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	44
49	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
50	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	52
51	4	3	4	3	4	2	4	4	3	4	4	39
52	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	46
53	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	45

Lanjutan Tabel

NO	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X ₃)											JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	
54	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	46
55	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	46
56	4	3	4	4	4	2	5	3	3	3	3	38
57	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
58	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	52

59	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	47
60	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	46
61	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	5	46
62	4	5	5	3	4	3	4	3	3	4	4	42
63	4	5	4	3	4	3	4	4	2	4	4	41
64	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	47
65	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	53
66	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	46
67	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
68	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	45
69	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	44
70	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	46
71	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	44
72	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
73	5	4	5	4	4	2	4	4	4	3	4	43
74	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
75	4	5	4	4	5	4	5	3	4	4	4	46
76	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
77	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	44
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43
80	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	45

Lanjutan Tabel

NO	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X ₃)											JUMLAH
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	
81	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	47
82	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	44
83	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
84	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	51
85	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	52
86	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
87	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
88	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	41
89	4	3	4	3	4	3	4	4	2	3	3	37
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
91	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	46
92	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	45
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
94	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
95	4	4	4	3	4	2	4	3	3	3	3	37
96	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	47

Lampiran 3 : Hasil Pengolahan Data

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI (Y)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y ₁	96	1	5	3,66	,662
Y ₂	96	2	5	3,75	,665
Y ₃	96	1	5	3,81	,685
Y ₄	96	1	5	3,88	,757
Y ₅	96	1	5	3,89	,596
Y ₆	96	1	5	4,10	,688
Y ₇	96	1	5	3,92	,691
Y ₈	96	1	5	4,00	,649
Y ₉	96	1	5	4,09	,727
Y ₁₀	96	1	5	4,06	,662
Y ₁₁	96	1	5	4,00	,711
Y ₁₂	96	1	5	4,22	,714
Y ₁₃	96	1	5	4,05	,731
Valid N (listwise)	96				

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF Komitmen Organisasi (X₁)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X _{1.1}	96	1	5	3,86	,866
X _{1.2}	96	1	5	3,81	,886
X _{1.3}	96	1	5	3,96	,780
X _{1.4}	96	1	5	3,82	,883
X _{1.5}	96	1	5	3,80	,902
X _{1.6}	96	1	5	3,72	1,013
X _{1.7}	96	1	5	3,99	,840
X _{1.8}	96	1	5	3,98	,846
X _{1.9}	96	1	5	4,01	,788
Valid N (listwise)	96				

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X₂)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X _{2.1}	96	2	5	4,04	,710
X _{2.2}	96	2	5	4,28	,575
X _{2.3}	96	2	5	4,14	,675
X _{2.4}	96	2	5	4,00	,649
X _{2.5}	96	2	5	4,32	,657
X _{2.6}	96	2	5	4,32	,624
X _{2.7}	96	2	5	4,14	,675
X _{2.8}	96	3	5	4,17	,627
X _{2.9}	96	2	5	4,23	,688
X _{2.10}	96	2	5	4,19	,701
X _{2.11}	96	2	5	4,31	,568
X _{2.12}	96	2	5	4,20	,675
Valid N (listwise)	96				

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X _{3.1}	96	3	5	4,26	,464
X _{3.2}	96	2	5	4,11	,540
X _{3.3}	96	3	5	4,37	,528
X _{3.4}	96	2	5	3,99	,589
X _{3.5}	96	3	5	4,18	,481
X _{3.6}	96	1	5	3,66	,868
X _{3.7}	96	1	5	4,23	,827
X _{3.8}	96	1	5	3,76	,791
X _{3.9}	96	1	5	3,84	,716
X _{3.10}	96	1	5	3,88	,653
X _{3.11}	96	3	5	4,17	,536
Valid N (listwise)	96				

**UJI VALIDITAS DATA
IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS
AKRUAL (Y)**

Correlations

		Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈	Y ₉	Y ₁₀	Y ₁₁	Y ₁₂	Y ₁₃	IMPLE SAP A
	Pearson Correlation	1	.424**	.274**	.228*	.246*	.126	.259*	-.024	.265**	.146	.134	.383**	.146	
	Sig. (2-tailed)		.000	.007	.025	.016	.223	.011	.813	.009	.157	.192	.000	.155	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Pearson Correlation	.424**	1	.219*	.167	.325**	.127	.183	.293**	.114	.036	.000	.161	.200	
	Sig. (2-tailed)	.000		.032	.103	.001	.219	.074	.004	.267	.729	1.000	.118	.050	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Pearson Correlation	.274**	.219*	1	.177	.205*	.287**	.189	.284**	.015	.119	.043	.171	.167	
	Sig. (2-tailed)	.007	.032		.084	.046	.005	.065	.005	.888	.249	.676	.096	.104	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Pearson Correlation	.228*	.167	.177	1	.271**	.167	.302**	.343**	.289**	.247*	.274**	.343**	.145	
	Sig. (2-tailed)	.025	.103	.084		.008	.105	.003	.001	.004	.015	.007	.001	.159	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	

Lanjutan Tabel

		Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈	Y ₉	Y ₁₀	Y ₁₁	Y ₁₂	Y ₁₃	IMPLE SAP A
	Pearson Correlation	.246*	.325**	.205*	.271**	1	.312**	.258*	.327**	.244*	.285**	.248*	.159	.280**	
	Sig. (2-tailed)	.016	.001	.046	.008		.002	.011	.001	.017	.005	.015	.123	.006	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Pearson Correlation	.126	.127	.287**	.167	.312**	1	.306**	.259*	.296**	.332**	.301**	.253*	.324**	
	Sig. (2-tailed)	.223	.219	.005	.105	.002		.002	.011	.003	.001	.003	.013	.001	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Pearson Correlation	.259*	.183	.189	.302**	.258*	.306**	1	.211*	.435**	.380**	.322**	.528**	.342**	
	Sig. (2-tailed)	.011	.074	.065	.003	.011	.002		.039	.000	.000	.001	.000	.001	

	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Pearson Correlation	-.024	.293**	.284**	.343**	.327**	.259*	.211*	1	.246*	.221*	.434**	.250*	.466**	
	Sig. (2-tailed)	.813	.004	.005	.001	.001	.011	.039		.016	.031	.000	.014	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Pearson Correlation	.265**	.114	.015	.289**	.244*	.296**	.435**	.246*	1	.469**	.428**	.630**	.447**	
	Sig. (2-tailed)	.009	.267	.888	.004	.017	.003	.000	.016		.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	

Lanjutan Tabel

		Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈	Y ₉	Y ₁₀	Y ₁₁	Y ₁₂	Y ₁₃	IM SA
	Pearson Correlation	.146	.036	.119	.247*	.285**	.332**	.380**	.221*	.469**	1	.313**	.439**	.407**	
	Sig. (2-tailed)	.157	.729	.249	.015	.005	.001	.000	.031	.000		.002	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Pearson Correlation	.134	.000	.043	.274**	.248*	.301**	.322**	.434**	.428**	.313**	1	.415**	.344**	
	Sig. (2-tailed)	.192	1.000	.676	.007	.015	.003	.001	.000	.000	.002		.000	.001	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Pearson Correlation	.383**	.161	.171	.343**	.159	.253*	.528**	.250*	.630**	.439**	.415**	1	.462**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.118	.096	.001	.123	.013	.000	.014	.000	.000	.000		.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Pearson Correlation	.146	.200	.167	.145	.280**	.324**	.342**	.466**	.447**	.407**	.344**	.462**	1	
	Sig. (2-tailed)	.155	.050	.104	.159	.006	.001	.001	.000	.000	.000	.001	.000		
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
NTASI SAP (Y)	Pearson Correlation	.484**	.429**	.421**	.543**	.546**	.551**	.641**	.579**	.668**	.594**	.581**	.712**	.644**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA KOMITMEN ORGANISASI (X_1)

Correlations

[illegible]

Lanjutan Tabel

		X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	X _{1.7}	X _{1.8}	X _{1.9}	KOMITMEN ORGANISASI (X1)
X _{1.6}	Pearson Correlation	.004	.117	-.015	.097	.250*	1	.356**	.300**	.307**	.555**
	Sig. (2-tailed)	.968	.258	.885	.348	.014		.000	.003	.002	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{1.7}	Pearson Correlation	.085	.110	.048	.111	.122	.356**	1	.237*	.366**	.528**
	Sig. (2-tailed)	.411	.284	.646	.281	.235	.000		.020	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{1.8}	Pearson Correlation	.111	.079	.286**	.051	.188	.300**	.237*	1	.300**	.549**
	Sig. (2-tailed)	.281	.444	.005	.619	.067	.003	.020		.003	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{1.9}	Pearson Correlation	.125	.259*	.103	.139	.314**	.307**	.366**	.300**	1	.623**
	Sig. (2-tailed)	.223	.011	.316	.177	.002	.002	.000	.003		.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
KOMITMEN ORGANISASI (X1)	Pearson Correlation	.452**	.531**	.378**	.458**	.519**	.555**	.528**	.549**	.623**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

**. Correlation is significant at the 0.01 level.

*. Correlation is significant at the 0.05 level.

UJI VALIDITAS DATA
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (X₂)

Correlations

		X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	X _{2.9}	X _{2.10}	X _{2.11}	X _{2.12}	KUALITAS SDM (X ₂)
X _{2.1}	Pearson Correlation	1	.255*	.296*	.366*	.287*	.302*	.406*	.197	.174	.259*	.307*	.137	.550**
	Sig. (2-tailed)		.012	.003	.000	.005	.003	.000	.054	.089	.011	.002	.185	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{2.2}	Pearson Correlation	.255*	1	.064	.028	.147	.126	.172	.073	.155	.155	.308*	.045	.327**
	Sig. (2-tailed)	.012		.538	.785	.152	.223	.094	.480	.132	.131	.002	.664	.001
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{2.3}	Pearson Correlation	.296**	.064	1	.553*	.447*	.520*	.537*	.245*	.182	.413*	.218*	.357**	.659**
	Sig. (2-tailed)	.003	.538		.000	.000	.000	.000	.016	.076	.000	.033	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{2.4}	Pearson Correlation	.366**	.028	.553*	1	.543*	.442*	.457*	.466*	.307*	.440*	.200	.385**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000	.785	.000		.000	.000	.000	.000	.002	.000	.051	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{2.5}	Pearson Correlation	.287**	.147	.447*	.543*	1	.385*	.423*	.456*	.254*	.439*	.291*	.424**	.691**
	Sig. (2-tailed)	.005	.152	.000	.000		.000	.000	.000	.013	.000	.004	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

Lanjutan Tabel

		X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	X _{2.9}	X _{2.10}	X _{2.11}	X _{2.12}	KUALITAS SDM (X ₂)
X _{2.6}	Pearson Correlation	.302*	.126	.520	.442	.385	1	.545	.426	.365	.607	.396	.422*	.749**
	Sig. (2-tailed)	.003	.223	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{2.7}	Pearson Correlation	.406*	.172	.537	.457	.423	.545	1	.295	.318	.480	.301	.334*	.717**

	Sig. (2-tailed)	.000	.094	.000	.000	.000	.000		.004	.002	.000	.003	.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{2.8}	Pearson Correlation	.197	.073	.245*	.466**	.456**	.426**	.295**	1	.447**	.407**	.177	.170	.588**
	Sig. (2-tailed)	.054	.480	.016	.000	.000	.000	.004		.000	.000	.084	.098	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{2.9}	Pearson Correlation	.174	.155	.182	.307**	.254*	.365**	.318**	.447**	1	.347**	.111	.332*	.546**
	Sig. (2-tailed)	.089	.132	.076	.002	.013	.000	.002	.000		.001	.281	.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{2.10}	Pearson Correlation	.259*	.155	.413**	.440**	.439**	.607**	.480**	.407**	.347**	1	.301**	.455*	.723**
	Sig. (2-tailed)	.011	.131	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001		.003	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

Lanjutan Tabel

		X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	X _{2.9}	X _{2.10}	X _{2.11}	X _{2.12}	KUALITAS SDM (X2)
X _{2.11}	Pearson Correlation	.307**	.308**	.218*	.200	.291**	.396**	.301**	.177	.111	.301**	1	.304**	.514**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.033	.051	.004	.000	.003	.084	.281	.003		.003	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{2.12}	Pearson Correlation	.137	.045	.357**	.385**	.424**	.422**	.334**	.170	.332**	.455**	.304**	1	.595**
	Sig. (2-tailed)	.185	.664	.000	.000	.000	.000	.001	.098	.001	.000	.003		.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
KUALITAS SDM (X2)	Pearson Correlation	.550**	.327**	.659**	.705**	.691**	.749**	.717**	.588**	.546**	.723**	.514**	.595**	1

	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X₃)

Correlations

[illegible]

Lanjutan Tabel

[illegible]

X _{3.9}	Pearson Correlation	.155	.156	-.038	.296*	.234*	.658*	.648*	.565*	1	.679*	.425*	.759**
	Sig. (2-tailed)	.131	.130	.711	.003	.022	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X _{3.10}	Pearson Correlation	.143	.280*	.137	.489*	.373*	.722*	.580*	.756*	.679*	1	.511*	.870**
	Sig. (2-tailed)	.164	.006	.182	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

Lanjutan Tabel

		X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	X _{3.5}	X _{3.6}	X _{3.7}	X _{3.8}	X _{3.9}	X _{3.10}	X _{3.11}	PEMANFAATAN TI (X3)
X _{3.11}	Pearson Correlation	.204*	.297**	.186	.472**	.455**	.373**	.221*	.393**	.425**	.511**	1	
	Sig. (2-tailed)	.046	.003	.070	.000	.000	.000	.030	.000	.000	.000		
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
PEMANFAATAN TI (X3)	Pearson Correlation	.242*	.371**	.302**	.615**	.576**	.822**	.657**	.784**	.759**	.870**	.642**	
	Sig. (2-tailed)	.018	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**HASIL UJI RELIABILITAS
IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)
BERBASIS AKRUAL (Y)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,826	13

**HASIL UJI RELIABILITAS
KOMITMEN ORGANISASI (X₁)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,644	9

**HASIL UJI RELIABILITAS
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (X₂)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,852	12

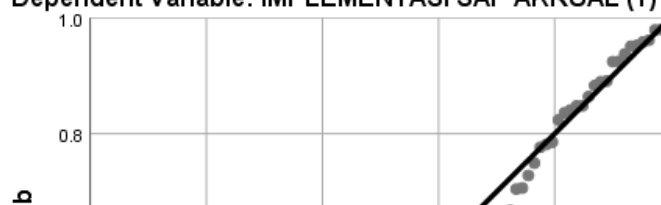
**HASIL UJI RELIABILITAS
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X₃)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,841	11

HASIL UJI NORMALITAS

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: IMPLEMENTASI SAP AKRUAL (Y)



HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

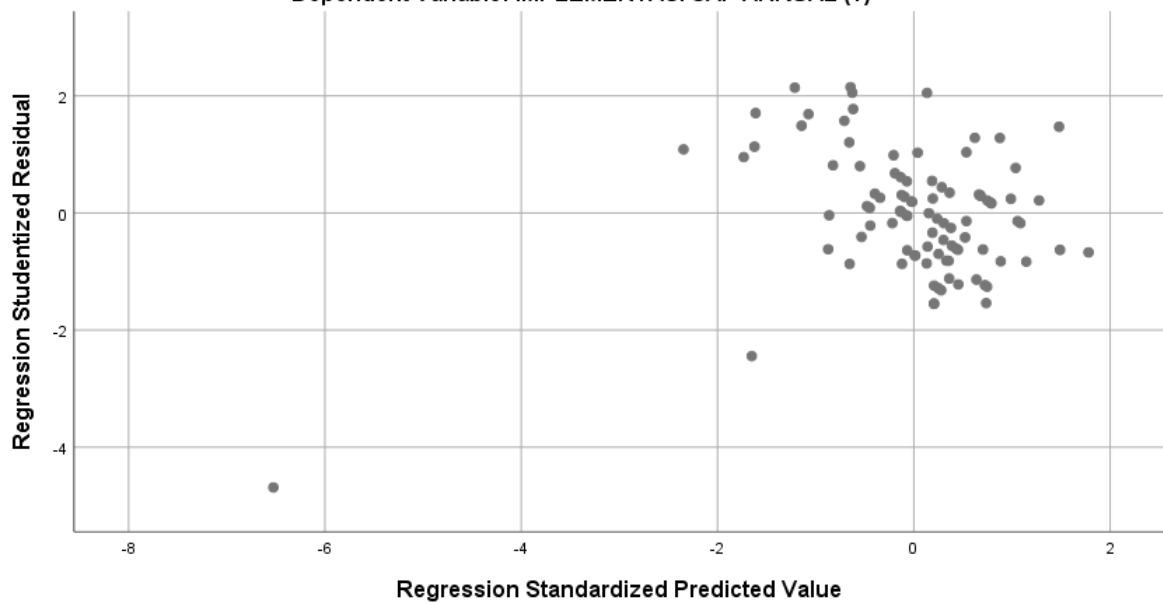
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KOMITMEN ORGANISASI (X1)	,753	1,327
	KUALITAS SDM (X2)	,649	1,542
	PEMANFAATAN TI (X3)	,661	1,512

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI SAP AKRUAL (Y)

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: IMPLEMENTASI SAP AKRUAL (Y)



HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,749 ^a	,561	,546	3,434	1,881

a. Predictors: (Constant), PEMANFAATAN TI (X3), KOMITMEN ORGANISASI (X1), KUALITAS SDM (X2)

b. Dependent Variable: IMPLEMENTASI SAP AKRUAL (Y)

HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,709	4,276		1,569	,120
	KOMITMEN ORGANISASI (X ₁)	,566	,102	,443	5,564	,000
	KUALITAS SDM (X ₂)	,239	,090	,228	2,653	,009
	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X ₃)	,290	,097	,253	2,982	,004

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI SAP AKRUAL (Y)

HASIL UJI HIPOTESIS PENELITIAN

1. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	---------------------------	---	------

		Beta		
1	(Constant)		1,569	,120
	KOMITMEN ORGANISASI (X1)	,443	5,564	,000
	KUALITAS SDM (X2)	,228	2,653	,009
	PEMANFAATAN TI (X3)	,253	2,982	,004

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI SAP AKRUAL (Y)

2. Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1384,442	3	461,481	39,128	,000 ^b
	Residual	1085,047	92	11,794		
	Total	2469,490	95			

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI SAP AKRUAL (Y)

Predictors: (Constant), PEMANFAATAN TI (X3), KOMITMEN ORGANISASI (X1), KUALITAS SDM (X2)

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,749 ^a	,561	,546	3,434

a. Predictors: (Constant), PEMANFAATAN TI (X3), KOMITMEN ORGANISASI (X1), KUALITAS SDM (X2)

b. Dependent Variable: IMPLEMENTASI SAP AKRUAL (Y)

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Titik Presentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan : Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Presentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan : Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Presentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan : Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Diki Candra
Tempat, Tanggal & Lahir : Bandar Alai, 9 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Tengah RT/RW 003/002, Desa Bandar Alai
Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten
Kuantan Singingi.
Telepon Rumah dan HP : 0822-8495-9235
E-mail : alexadiki09@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : - SD N 014 Bandar Alai Kari Teluk Kuantan (2003 – 2009)
- SMP N 4 Teluk Kuantan (2009 – 2012)
- SMK N 3 Teluk Kuantan (2012 – 2015)
- S1 Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi (2016 – 2020)
Pendidikan Nonformal : -
Riwayat Prestasi : - Peringkat 4 Bujang Dara Kuantan Singingi Tahun 2018
Prestasi Akademik : - SMK N 3 Teluk Kuantan peringkat 10 besar
Prestasi Nonakademik : -
Pengalaman Organisasi : - Anggota OSIS SMK 3 Teluk Kuantan (2 tahun)
- Ketua Divisi Advokasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Islam Kuantan Singingi
- Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMANSI) Universitas Islam Kuantan Singingi
Pengalaman Kerja : -

Demikian identitas diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Teluk Kuantan, 01 Juli 2020

Diki Candra
NPM : 160412011

